

# JURNAL STUDI ILMU POLITIK

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JSIPO>

Published by:  
Faculty of Social and Political Sciences  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang



VOLUME 3, (ISSUE 2, APRIL 2024)

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

**SOSIALISASI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PLATFORM INSTAGRAM  
(STUDI PADA AKUN @PINTERPOLITIK)**

*Togar, Yulion Zalpa, Norma Juainah, 64 - 76*

**POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA:  
MEMBANGUN SOLIDARITAS ATAU MEMECAH BELAH MASYARAKAT  
(UPAYA REKONSILIASI POLITIK IDENTITAS PASCA PELAKSANAAN PEMILU 2024)**

*Yohanes Mba Malo Sali, 77 - 91*

**DINAMIKA POLITIK DI DALAM TATA KUASA LAHAN  
DI DESA TANJUNG MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

*Nur Fhadilah, Yenrizal, Yulion Zalfa, 92 - 103*

**MARKETING POLITIK AKA CHOLIK DARLIN  
PADA AKUN YOUTUBE AKA CHOLIK TV MENUJU PEMILU 2024**

*Tiara Yunita, Ainur Ropik, Siti Anisyah, 104 -116*

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2024  
DI DESA KERTAJAYA KABUPATEN PANGANDARAN**

*Nur Aziz, 117- 126-*

VOLUME 3

ISSUE 2

PAGE  
64 - 126

APRIL  
2024

PUBLISH BY :

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
FATAH PALEMBANG**

## **SOSIALISASI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PLATFORM INSTAGRAM (STUDI PADA AKUN @PINTERPOLITIK)**

**Togar<sup>1</sup>, Yulion Zalpa<sup>2</sup>, Norma Juainah<sup>3</sup>**

Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: togar2612tgr@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The means of political socialization and political education are family, school, social groups, work, mass media and political contacts. This research will focus on the means of political socialization and political education through mass media, namely the Instagram platform @Pinterpolitik. The aim of this research is to determine the forms and patterns of political socialization and political education on the Instagram account @pinterpolitik. This type of research is descriptive qualitative. This research found that people must understand the capabilities of their own country and must believe that their country has advantages. They must also have a critical attitude to be able to determine their attitude towards political events that occur, and they must also understand the rules, laws and regulations.*

**Keywords:** *Political socialization, political education and Instagram*

### **ABSTRAK**

Sarana sosialisasi politik dan Pendidikan politik yaitu keluarga, sekolah, kelompok bergaul, pekerjaan, media massa dan kontak-kontak politik. Pada penelitian ini akan berfokus pada sarana sosialisasi politik dan Pendidikan politik melalui media masa yaitu platform Instagram @Pinterpolitik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bentuk dan Pola Sosialisasi politik dan Pendidikan politik pada akun Instagram @pinterpolitik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat harus memahami kemampuan negara mereka sendiri dan harus percaya bahwa negara mereka memiliki kelebihan Mereka juga harus memiliki sikap kritis untuk dapat menentukan sikap mereka terhadap peristiwa politik yang terjadi, dan mereka juga harus memahami tata tertib, hukum, dan peraturan.

**Kata Kunci:** Sosialisasi politik, Pendidikan politik dan Instagram

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang di amanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, sosialisasi politik dan pendidikan politik sangat penting untuk mencapai tujuan ini karena keduanya membangun warga negara yang cerdas secara politik, sadar akan hak dan kewajibannya, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan negara yang adil dan berkeadilan.

Sosialisasi politik membahas tentang ide-ide politik, kemajuan, dan cara berpolitik. Sosialisasi politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung.

Sosialisasi politik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menggunakan hak mereka untuk memilih dan berpartisipasi dalam kegiatan pemilu dalam keadaan seperti ini. Sosialisasi politik, yaitu cara penduduk atau sebagian penduduk melihat atau mengalami kehidupan politik dijalankan dengan cara yang berbeda, dapat mengubah kebudayaan politik. Menurut Ramlan Surbakti (2010) dalam metode penyampaian pesan, jenis sosialisasi politik dibagi menjadi dua salah satunya adalah Pendidikan politik.

Pendidikan politik adalah proses untuk mengenalkan atau menunjukkan kepada masyarakat suatu negara betapa pentingnya pengetahuan politik. Pendidikan politik sangat penting, terutama selama periode menjelang pemilihan umum, agar masyarakat memahami pentingnya memilih pemimpin dengan hati-hati dan menghindari tertipu oleh janji kampanye bahwa mereka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi janji-janji ini akhirnya tidak terpenuhi (Yusri, 2019).

Menurut Almond dalam (Labolo & Avelrus, 2022), ada enam cara sosialisasi politik dan pendidikan politik: keluarga, sekolah, kelompok-kelompok, pekerjaan, media massa, dan kontak politik. Penelitian ini akan mengeksplorasi metode untuk pendidikan politik dan sosialisasi politik melalui platform Instagram @pinterpolitik.

Ada beberapa alasan yang mendorong peneliti untuk meneliti akun @pinterpolitik. Pertama, akun Instagram @pinterpolitik telah menarik perhatian publik, seperti yang ditunjukkan oleh 541 ribu pengikutnya. Kedua, kontennya informatif dan mendidik, sehingga pengguna dapat memahami masalah politik terbaru dengan lebih baik. Terakhir, akun ini menarik perhatian para peneliti karena gaya inovatifnya dalam menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh audiensnya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang akun @pinterpolitik, yang memposting tentang masalah atau fenomena politik saat ini yang berkaitan dengan sosialisasi politik dan pendidikan politik, yang dapat mempengaruhi pandangan politik penggunanya. Akun Instagram @pinterpolitik telah memposting 11,4ribu postingan dan memiliki 541 ribu pengikut, dan setiap hari dapat memposting 7–14 postingan tentang berita politik. Fokus peneliti adalah postingan tentang pendidikan politik dan sosialisasi politik terhitung dari juni 2023 hingga januari 2024. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana Bentuk dan Pola Sosialisasi politik dan Pendidikan politik pada akun Instagram @pinterpolitik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992), pendekatan ini dapat menghasilkan data deskriptif tentang ucapan, tulisan, dan perilaku subjek penelitian. Penelitian ini menggambarkan gejala, peristiwa, dan kejadian yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis menggunakan studi kepustakaan untuk merujuk pada buku, artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan Sosialisasi politik dan Pendidikan politik di akun @pinterpolitik.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan langsung dari sumber bersangkutan melalui pengamatan postingan di akun Instagram @pinterpolitik, yang berfokus pada bentuk dan pola sosialisasi politik dan pendidikan politik. Data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku, jurnal, internet, berita dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian pendidikan politik dan sosialisasi politik. Yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data di mana peneliti memeriksa teori, pendapat, dan gagasan yang ditemukan dalam literatur cetak, seperti buku dan jurnal ilmiah, yang relevan dan mendukung topik penelitian ini.
2. Observasi: Metode pengamatan langsung terhadap gejala atau peristiwa dalam akun @pinterpolitik yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tujuan dari metode observasi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang semua gejala dan peristiwa, termasuk masalah.
3. Dokumentasi : Peneliti menggunakan screenshot pribadi dari postingan-postingan akun Instagram @pinterpolitik untuk mendapatkan data penelitian ini.

Analisa data adalah proses penelaahan, pengelompokan, penafsiran, dan verifikasi data untuk menghasilkan nilai sosial atau ilmunan. Peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (1992) dalam (Ahyar et al., 2020), yang dibagi menjadi tiga alur kerja simultan. Terdapat tiga alur: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan sumpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Melalui portal web akun @PinterPolitik peneliti mendapatkan gambaran umum tentang @pinterpolitik. PinterPolitik adalah platform berita online dan media sosial milik PT. Media Pintar Kreasi yang berlokasi di Jakarta. Dewan Pers telah memberikan pengakuan resmi kepada PinterPolitik dengan nomor SPS: 660/2016/11/E/2019 (Pinterpolitik, 2019). Wim menciptakan berita dengan konten berkualitas serta kreatif bagi pembaca. Dalam mewujudkannya, keduanya dibantu tim penulis,

desainer grafis, serta videografer terbaik dengan kreativitas serta inovasi tinggi (<https://www.pinterpolitik.com/profile>, diakses pada 14 desember 2023).

Pinter Politik berbeda dari situs berita lain karena sifat kreatif. Penulisan, infografis, dan video tidak sekadar menyampaikan peristiwa seperti portal berita lainnya; mereka memberikan perspektif yang lebih mendalam dan memberikan informasi dari berbagai sudut pandang. Sesuai dengan motonya, "Pinter Politik" hadir untuk memberikan penjelasan tentang berita politik negara ini.

Bentuk dan pola Sosialisasi politik dan Pendidikan politik pada akun Instagram @pinterpolitik pada bab ini akan dibahas melalui 2 teori yaitu teori Pendidikan politik dengan empat dimensi. Pendidikan politik merupakan sebuah cara untuk memahami kondisi politik atau pemahanan sudut pandang politik dari berbagai bentuk permasalahan yang ada terkait politik dan teori analisis isi (content analysis). Kedua teori ini akan menjadi pisau tajam dalam penelitian ini yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### Pendidikan politik *bildungswissen* (karakter individu sebagai warga negara).

Membangun kepercayaan diri dan memberi tahu orang tentang kekuatan bangsa mereka adalah tujuan dari pendidikan politik yang dikenal sebagai *Bildungswissen*. Penelitian ini menemukan bentuk dan pola posting di akun Instagram @pinterpolitik yang sesuai dengan ide *Bildungswissen* tentang pendidikan politik, pada postingan pada 8 Agustus 2023 tentang ekonomi Indonesia mengalahkan AS?



Sumber: Screenshot pribadi diambil 24 Desember 2023

Gambar 1 (Melnko Perekonomian) Airlangga Hartanto dengan bangga menyebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Dari postingan di atas peneliti menemukan bahwa gambar dan caption postingan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menggambarkan kesuksesan ekonomi Indonesia dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kekuatan bangsa. Selain itu, pernyataan yang dibuat oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto, yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan bukti penting dari daya saing global Indonesia. Selain itu, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pencapaian ekonomi yang berhasil mencerminkan kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi tantangan di seluruh dunia dan keinginan untuk mencapai lebih banyak prestasi di masa depan.

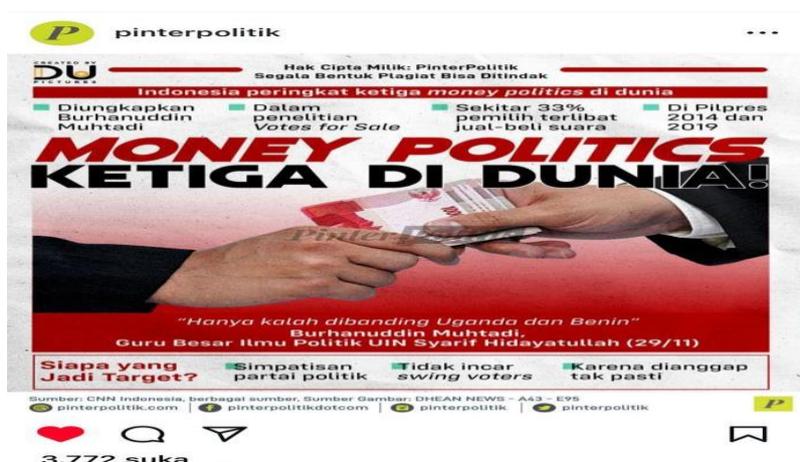
Adapun komentar yang datang dari pengikut akun ini yang telah peneliti observasi berdasarkan konsep politik *bildungswissen* yakni:

*@ djodikusuma, Alhamdulillah... semoga terus bertumbuh negaraku Indonesia untuk kemuliaan dan kesejahteraan rakyatnya...aamiin. @emesmunir, Indonesia bagai kecambah, AS bagai pohon kedelai yang sudah berbuah... kalau pertumbuhan kecambah dibandingkan dengan pertumbuhan pohon kedelai yang sudah berbuah, jadinya sesatpikir...hahaha....@seniorart\_design,ASTAHFIRULLAHALDZIM.... beneran?.20rebu bkn Kel Miskin sehari bisa ngalahin AS yg sejam dpt 300rebu.... emeiijing.*

Berdasarkan komentar di atas, peneliti melihat bahwa akun pinterpolitik memberi pendidikan politik kepada pengikutnya menunjukkan berbagai tingkat kesadaran masyarakat tentang kekuatan dan identitas bangsa Indonesia; sebagian orang menyambutnya dengan harapan untuk kemajuan dan kemuliaan Indonesia; dan im menunjukkan potensi negara ini. Namun, beberapa orang menekankan perbedaan ekonomi yang signifikan dan mempertanyakan perbandingan dengan Amerika Serikat. Dengan beragamnya tanggapan terhadap kondisi ekonomi dan harapan terhadap kesejahteraan rakyat, kesadaran masyarakat terhadap kekuatan bangsa Indonesia.

### **Pendidikan politik *orientierungswissen* (realitas sistem politik).**

Konsep pendidikan politik yang dikenal sebagai *orientierungswissen* membantu masyarakat memahami fakta politik, kelemahan politik, dan konflik politik. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bentuk dan pola postingan di akun Instagram @pinterpolitik selaras dengan konsep pendidikan politik *Orientierungswissen*. Pada postingan yang dibuat pada tanggal 6 desember 2023 mengenai Indonesia money politics ketiga di dunia.



Sumber: Screenshot pribadi diambil 25 Desember 2023

**Gambar 2 Postingan Money Politics**

Postingan ini terkait dengan konsep orientierungswissen, di mana fakta politik dan kelemahan politik Indonesia adalah adanya politik uang. Politik uang Indonesia telah berkembang sejak era pemilihan langsung legislatif dan presiden dan kepala daerah. Politik menggunakan uang dimulai sebelum kampanye, selama kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara. Tidak hanya pengolahan gambar yang baik dan menarik, informasi yang diberikan dalam postingan ini sangat menarik bagi mereka yang menyukai aspek pemilihan gambar yang tidak konvensional.

Adapun komentar yang datang dari pengikut akun ini yang telah peneliti observasi berdasarkan konsep politik bildungswissen yakni:

*@kholisaji\_24, SDM yg rendah, regulasi yg tdak ketat, mutu pendidikan yg blum bisa memberikan edukasi, pemain nya malah juga penyelenggara pemilu, sudah turun temurun.*  
*@ kaptennaufalz, Ramai-ramai menuduh negara korup, ternyata negara cerminan rakyat nya (walau ngak semua) tapi cukup representatives.* *@ hudzaifikhwanuddinnn, kalo kata orang-orang sih "ambil uangnya aja, jangan coblos orangnya".* *@ kang\_wildanrist, Pusing juga denger statement warga yang bilang pilih orang yang amplop nya gede.* *@ aqshalfazrin13, Bukan hanya bentuk uang sih pembagian baju, susu, dllnya juga gak beda jauh sama money politik.*

Berdasarkan komentar di atas yang peneliti perhatikan, edukasi yang diberikan oleh akun *pinterpolitik* pada postingannya yakni menunjukkan bahwa politik uang memang ada di Indonesia. Komentar tersebut menunjukkan keadaan politik di Indonesia, di mana praktik politik uang masih menjadi masalah besar. Sumber daya manusia yang tidak memadai, peraturan yang tidak ketat, dan kualitas pendidikan yang buruk dapat menyebabkan praktik politik yang tidak sehat berkembang.

Selain itu, tuduhan korupsi terhadap negara menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga politik. Selain itu, pernyataan yang berkaitan dengan pemilihan yang didasarkan pada amplop atau pembagian bantuan menunjukkan kekhawatiran tentang pengaruh finansial yang berlebihan terhadap proses politik Indonesia.

### **Pendidikan politik *verhaltungweissen* (norma hukum)**

Verhaltungweissen adalah gagasan pendidikan politik yang menekankan pada pemahaman tentang hukum, tata tertib, dan peraturan yang dapat menjadi dasar untuk tingkah laku politik. Pada penelitian ini menemukan bentuk dan pola postingan di akun Instagram @pinterpolitik sesuai dengan konsep Verhaltungweissen tentang pendidikan politik. Pada postingan yang diposting pada tanggal 6 desember 2023 oleh DPR Revisi UU ITE diresmikan.



Sumber: Screenshot pribadi diambil 25 Desember 2023

**Gambar 3 Revisi UU ITE diremilkan DPR**

Dari gambar dan caption postingan di atas, pendidikan politik mengajarkan masyarakat bagaimana mengkritik kebijakan dan ketidakkonsistenan pemerintah dalam membuat keputusan yang bijaksana. Jadi, menjadi pertanyaan besar kenapa revisi kedua UU ITE ini diumumkan sementara pemilu 2024 semakin dekat, dan banyak orang yang menyukai dan mengomentari gagasan ini, menunjukkan bahwa gagasan ini berhasil memberikan sosialisasi politik dan pendidikan politik.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti jika dikaitkan konsep *verhaltungweissen* (norma hukum), peneliti menemukan bahwa dalam konteks pemahaman hukum masyarakat, respons kontra mencerminkan kekhawatiran terhadap kejelasan norma hukum. Masyarakat umum mungkin menginginkan undang-undang yang tidak hanya melindungi hak asasi tetapi juga memberikan aturan yang jelas tanpa ambiguitas yang dapat disalahgunakan.. Adapun

komentar yang datang dari pengikut akun ini yang telah peneliti observasi berdasarkan konsep politik *verhaltungweissen*:

@ pras.tr, *Galebih cuma Otak atik taktik politik.* @ etis\_wardhana, *Kontras ni yg bela hak asasi begal kemarin y.* @ mbahgoen\_gunawan, *aktik jitu atau Picik atau Namanya juga politik??? Mengutak atik di celah sempit, di ruang2 gelap, bersama tikus2 got yg biasa dilihat di gorong2....*@ tobi\_hio69, *Alhamdulillah, semua fraksi ikut setuju paling yg gk setuju cuma I.*

Peneliti melihat bahwa, berdasarkan komentar di atas, akun Pinterpolitik memberikan edukasi melalui postingannya, yang menunjukkan perbedaan pandangan tentang pemahaman tentang norma hukum. Beberapa orang mengkritik postingan tentang UU ITE di atas sebagai taktik politik, dan ada juga yang setuju dengan keputusan yang diambil. Perbedaan ini menunjukkan keragaman pandangan dalam masyarakat tentang norma hukum dan menjadi hal yang menarik bagi masyarakat.

### Pendidikan politik *aktionwissen* (perilaku politik)

Aktionwissen adalah ide dalam pendidikan politik yang mengajarkan orang untuk bertindak dengan benar, cermat, dan adil karena didukung oleh prinsip keadilan dan kebenaran, serta pemikiran kritis dan objektif. Dalam penelitian ini menemukan bentuk dan pola postingan pada akun Instagram @pinterpolitik yang sesuai dengan konsep pendidikan politik Aktionwissen, misalnya postingan Luhut pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah solusi untuk masalah polusi?, yaitu:



Sumber: Screlelnshot prilbadil dilambill 26 Delselmbelr 2023

**Gambar 4** Luhut adalah solusinya

Pada gambar posting di atas menunjukkan pendidikan politik tentang cara membuat kebijakan untuk mengatasi masalah. Tujuan dari pendidikan politik ini adalah untuk mengajarkan pembaca tentang bagaimana pembuatan kebijakan dapat digunakan untuk mengatasi masalah tertentu, seperti polusi di Jakarta. Selain itu, postingan di atas menunjukkan bahwa masalah polusi di Jakarta sangat sulit untuk diselesaikan, yang memerlukan individu yang benar-benar ahli seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Postingan ini relevan dengan konsep pendidikan politik *aktionwissen* membuat orang untuk bertindak dengan benar, cermat, dan adil karena didukung oleh prinsip keadilan dan kebenaran, serta pemikiran kritis dan objektif, yakni dimana berdasarkan fakta atau deretan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bisa diberbagai bidang seperti, Ketua Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Dewan SDA Nasional, Ketua Pengarah Satgas Sawit, dan Ketua Satgas Percepatan. Adapun komentar yang datang dari pengikut akun ini yang telah peneliti observasi berdasarkan konsep pendidikan politik *aktionwissen* yakni:

*@yudiranda, Klo kerjanya solutif & nyelesain masalah knp ga. Kan yg penting hasil, ga masalah siapa orgnya. @ regust\_indra, Ini hebat nya Luhut, tiap di kasih kerjaan pasti beres... Gak banyak omong, bekerja dalam senyap. Tau tau udh beres aja, wajar klo banyak yg gak suka Ama beliau... Yg bisa nya cuma nyinyir doank tanpa hasil...@ardielsyah7, Presiden gmn ya ... Jls bngt ketergantungan SM luhut. @ didik\_be\_es, Solusi nya beralih ke kendaraan Listrik.*

Berdasarkan komentar di atas, peneliti melihat bahwa pendidikan politik yang diberikan oleh akun *pinterpolitik* pada postingannya menunjukkan bahwa masyarakat setuju dan memuji kemampuan Pak Luhut untuk menyelesaikan masalah di Jakarta dan sekitarnya karena mereka telah mengetahui kemampuan Pak Luhut untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

### **Bentuk dan pola Sosialisasi Politik yang dilakukan akun @pinterpolitik**

Sosialisasi politik didefinisikan sebagai proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi terhadap gejala politik menurut Rush dan Althoff (Damsar, 2015). Memahami sistem politik saat ini membutuhkan sosialisasi politik. Ahli ilmu sosial menggunakan istilah "sosialisasi" untuk menggambarkan bagaimana seorang anak dikenalkan dengan nilai-nilai masyarakat dan bagaimana mereka belajar peran yang akan mereka

mainkan di masa depan (MacAndrews, 1991). Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada postingan yang terindikasi dengan bentuk sosialisasi politik yaitu:



Sumber: Screenshot pribadi diambil pada 24 Januari 2024

**Gambar 5 Tema Debat Capres-Cawapres**

Dalam postingan sebelumnya, telah ditunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi politik akun @pinterpolitik telah berhasil, seperti yang ditunjukkan oleh respons yang positif dari pengikut akun Instagram @pinterpolitik, yang memiliki 14,952k like. Hal ini menunjukkan bahwa isi postingan itu menarik, terlibat, dan diterima dengan baik, yang menunjukkan bahwa itu efektif dalam membangun hubungan positif dengan audiens. Dengan melihat respons yang rinci, jelas bahwa konten postingan dapat membuat orang tertarik, menghasilkan tanggapan yang positif, dan menciptakan hubungan yang baik antara pemilik akun dan pengikutnya. Jumlah like yang tinggi menunjukkan respons massal, yang menunjukkan bahwa pesan postingan dapat mencapai dan meresapi audiens. Debat-debat ini juga dapat mendorong debat publik yang sehat.. Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam menganalisis argumen dan ide yang diusung oleh calon-calon, memperkuat pemahaman mereka terhadap isu-isu kompleks yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

### **Bentuk dan pola Pendidikan Politik yang dilakukan akun @pinterpolitik**

Menurut Alfian dalam (Pasaribu, 2020) mengatakan bahwa pendidikan politik adalah upaya untuk mengubah cara orang belajar tentang politik sehingga mereka dapat memahami apa yang ada di dalam sistem politik yang ideal. Akibatnya, akan muncul sikap dan tindakan baru yang akan mendukung sistem politik yang ideal.

Kartono menyatakan bahwa pendidikan politik dapat disebut sebagai pendidikan atau pembentukan politik. Pembentukan insan politik yang sadar akan status atau kedudukan politiknya di negaranya sendiri sangat penting dalam pendidikan politik. Menurut Kartono (2009), pendidikan politik didefinisikan sebagai upaya untuk menjadi insan politik secara sadar dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada postingan yang terindikasi dengan bentuk pendidikan politik yaitu:



Sumber: Screenshot prillbadil dilambill 24 Januari 2024

**Gambar 6 Gagasan Cawapres Debat Keempat**

Sebagai bentuk pendidikan politik, postingan akun Instagram @pinterpolitik mengenai gagasan cawapres dalam debat keempat memberikan informasi penting tentang gagasan cawapres, masalah yang dibahas, dan posisi politiknya. Komentar yang beragam dapat mencakup pertanyaan, diskusi, dan tanggapan positif, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah politik yang dibahas. Ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang elemen politik yang penting. Komentar dan interaksi yang terjadi di bawah postingan memungkinkan diskusi. Dengan cara ini, komunitas dapat saling bertukar pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berbicara tentang perspektif politik. Ketiga, banyaknya like menunjukkan bahwa banyak orang memahami dan menyuarakan pendapat mereka tentang gagasan cawapres. hal ini dapat dianggap keterlibatan aktif dalam proses politik.

Gagasan cawapres dalam debat keempat bisa sangat berpengaruh pada pendidikan politik dengan memberikan wawasan dan informasi yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang isu-isu politik, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti teliti mengenai sosialisasi politik dan pendidikan politik melalui akun Instagram @pinterpolitik peneliti menemukan hasil dari observasi bahwa Bentuk dan Pola Sosialisasi politik dan Pendidikan politik pada akun tersebut telah sesuai dengan konsep teori pendidikan politik yang dicetuskan oleh Gischke yakni dengan empat dimensi “*bildungswissen, orientierungswissen, verhaltungswissen und aktionwissen*”, kemudian dideskripsikan menggunakan teori melalui teori analisis isi (*content analysis*).

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dan pola sosialisasi politik dan pendidikan politik yang telah dilakukan oleh akun Instagram @pinterpolitik telah memenuhi kebutuhan akan pengetahuan politik yang diperlukan oleh Masyarakat yang melek digital. Pada saat ini banyak sekali Masyarakat tidak peduli dan acuh dengan perpolitikan yang ada di Indonesia atau bersifat apatisme sehingga hadirnya akun ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peristiwa politik yang tengah berlangsung.

## SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*.
- Aminah, S., & Roikan. (2019). *Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik* (wanda). Prenadamedia Group
- Anjani, A. (2019). *Akun Instagram @pinterpolitik Sebagai Platform Linterasi digital (studi Deskriptif Kualitatif pada pinterpolitik.com)*.Skripsi
- Bogdan, Robert C. And Taylors K.B. 1992. (*Qualitative ResearctchFor Education An Introduction To Theory And Metdods*. Boston: Ally And Bacon Inc.
- Damsar, 2015, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenada Media.
- Eko Handoyo dan Puji Lestari, 2017, *Pendidikan Politik*, Semarang : Pohon Cahaya.
- Gabriel Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture*, (NJ: Princeton University Press, 1963), h.30
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal*. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9).
- Istikharah dan Asrinaldi. “*Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc*”. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 6, No. 2. (2019).

Togar, Yulion Zalpa, Norma Juainah, *Sosialisasi Politik Dan Pendidikan Politik Melalui Platform Instagram (Studi Pada Akun @Pinterpolitik)*, JSIPOL, Vol.3 Issue.2 No.1, April 30, 2024

- Juwandi Ronni, Nurwahid Yasin, dan Lestari Ayu. 2019. “*Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara*”. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Unitirta Vol. 2, No.1.
- Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Bandar Maju, 2009.
- Khoiron, M. Nur. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*. Yogyakarta: LKIS.
- Kweit, Mary G dan Robert W. Kweit, 1986, *Konsep dan Metode Analisis Politik terj.* Ratnawati, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Mahfud, Choirul. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mas’oed, Mohtar dan Colin MacAndrews, 1991, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nuspira, R. (2021). Persepsi Generasi Milenial Terhadap Akun Instagram “*Pinterpolitik*” Sebagai *Media Pendidikan Politik*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Pasaribu, Payerli. “*Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 5, No. 1 (2020).
- Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik (Adinto Fajar (Ed.))*. Pt Grasindo. (wanda). Prenadamedia Group
- Saputra, A. (2022). *Pendidikan Politik Remaja Milenial Melalui Instagram (Studi Pada Akun @Pinter Politik.Com, @Politico , Dan @Generasi Melek Politik)* Skripsi. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha ilmu
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), hlm. 15
- Yusri, Mohammad, dkk. *Pendidikan Politik Pemerintah Kontra Golput*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2019.

**POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA: MEMBANGUN SOLIDARITAS ATAU  
MEMECAH BELAH MASYARAKAT  
(Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2024)**

**Yohanes Mba Malo Sali<sup>1</sup>**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana-Malang  
Email: yohanzalli@gmail.com

**ABSTRACT**

*Democratization that defends freedom becomes the basis for every individual to renew themselves, even in political matters. The individual freedoms guaranteed by the Constitution in Indonesia reflect the high popularity of this democratic system. However, this freedom increasingly clarifies the gaps between identities (religion, ethnicity, language and gender) that exist in Indonesia, especially when it comes to national political issues. The identity politics controversy is increasingly heated until a statement of the truth emerges that one interest group is better than another interest group, and this issue of interest begins to divide the nation which has always maintained differences. This article aims to see the extent of the impact of identity politics on Indonesian society by referring to the book Political Philosophy by Armada Riyanto. The methodology used in this article is a qualitative research methodology referring to library research, especially books and articles related to identity politics in Indonesia. The conclusion of this article is that identity politics in Indonesia can destroy the Indonesian state, because there are different groups who demand their freedom.*

**Keywords:** Politics, Solidarity, Identity, Society, Phenomenon

**ABSTRAK**

*Demokratisasi yang membela kebebasan menjadi landasan bagi setiap individu untuk memperbarui diri, bahkan dalam urusan politik. Kebebasan individu yang dijamin oleh Konstitusi di Indonesia mencerminkan tingginya popularitas sistem demokrasi ini. Namun kebebasan tersebut semakin memperjelas kesenjangan antar identitas (agama, suku, bahasa, dan gender) yang ada di Indonesia, terutama jika menyangkut persoalan politik nasional. Kontroversi politik identitas semakin memanas hingga muncul pernyataan kebenaran bahwa satu kelompok kepentingan lebih baik dibandingkan kelompok kepentingan lainnya, dan persoalan kepentingan ini mulai memecah belah bangsa yang selama ini selalu mempertahankan perbedaan. Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak politik identitas pada masyarakat Indonesia dengan mengacu pada buku Filsafat Politik karya Armada Riyanto. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah metodologi penelitian kualitatif dengan mengacu pada penelitian kepustakaan, khususnya buku dan artikel terkait politik identitas di Indonesia. Kesimpulan dari artikel ini adalah politik identitas di Indonesia dapat menghancurkan negara Indonesia, karena ada kelompok yang berbeda-beda yang menuntut kebebasannya.*

**Kata Kunci:** Politik, Solidaritas, Identitas, Masyarakat, Fenomena

## **PENDAHULUAN**

Saat ini, politik identitas telah menjadi fenomena dominan dalam lanskap politik global. Politik identitas mengacu pada proses dimana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka berdasarkan karakteristik tertentu, seperti agama, etnis, gender, orientasi seksual atau latar belakang budaya. Identitas inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya persepsi politik dan orientasi ideologi (Muhtar Haboddin, 2012, 117). Dalam banyak kasus, politik identitas muncul sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas antar kelompok sejenis. Di tengah tantangan dan ketidakadilan yang dihadapi kelompok minoritas, politik identitas dapat menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan hak-haknya, mendapatkan pengakuan sosial dan perlindungan hukum.

Di sisi lain, politik identitas juga dapat menjadi sumber konflik sosial dan polarisasi. yang memecah belah masyarakat. Apabila politik identitas digunakan semata-mata untuk memperkuat kepentingan kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas secara keseluruhan, maka dapat menimbulkan perpecahan masyarakat menjadi faksi-faksi yang saling bertentangan. Tantangan terbesar dalam politik identitas adalah memastikan bahwa upaya untuk melindungi hak dan kepentingan kelompok tidak mengorbankan solidaritas sosial yang lebih luas. Membangun masyarakat inklusif memerlukan keseimbangan yang cermat antara pengakuan identitas yang berbeda dan persatuan serta kepentingan bersama.

Dalam hal ini, penting bagi negara dan pemimpin politik untuk mengadopsi pendekatan yang efektif dalam menanggapi politik identitas. Diperlukan kebijakan yang dapat mendorong inklusi sosial, mendorong dialog antar kelompok, dan mengatasi akar penyebab konflik identitas (Muhtar Haboddin, 2012, 118). Hanya dengan cara inilah politik identitas bisa menjadi alat untuk menciptakan solidaritas yang kuat di masyarakat. bukan sebagai sarana untuk memecah belah mereka.

Di Indonesia, politik identitas lebih berkaitan dengan etnis, agama, ideologi, dan kepentingan lokal, yang biasanya diwakili oleh elit yang menyuarakan pendapat mereka sendiri. Gerakan pemekaran wilayah dapat dilihat sebagai wujud politik identitas (Muhtar Haboddin, 2012, 117). Isu keadilan dan pembangunan daerah memang sangat sentral dalam perbincangan politiknya, namun apakah hal tersebut benar-benar terjadi atau memang ada niat dari elit lokal untuk menjadi pemimpin merupakan permasalahan yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan. Jadi pertanyaannya adalah: apa fungsinya? Politik identitas menciptakan solidaritas atau malah memecah belah masyarakat Indonesia yang nasionalis dan pluralistik di masa depan? Jika

berbahaya, dalam bentuk apa dan bagaimana cara mengobatinya? Melalui artikel tersebut, penulis mencoba menjelaskannya.

## **METODELOGI**

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini antara lain metode penelitian kualitatif dengan merujuk pada penelitian kepustakaan. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti di mana posisi obyek yang alamiah (Najoan, 2020, 68). Penulis mengumpulkan data-data mengenai politik identitas di Indonesia dalam buku-buku dan artikel-artikel yang ada berhubungan dengan masalah yang dipecahkan dalam artikel ini. Kemudian penulis hendak menyoroti efek dari politik identitas baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Setelah melihat keduanya, penulis mencoba memberi masukan berupa upaya untuk membangun kehidupan berpolitikan di Indonesia.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **A. POLITIK IDENTITAS**

Kajian mengenai politik identitas mulai menarik perhatian para ilmuwan sosial pada tahun 1970an, dimulai dari Amerika Serikat. Saat itu, pemerintah AS mempunyai permasalahan dengan kelompok minoritas, gender, feminisme, ras, etnis, dan kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan dan teraniaya. Kemudian, berdasarkan kesamaan tersebut, mereka mencoba mewajibkan negara untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, ruang lingkup politik identitas meluas hingga mencakup agama, kepercayaan dan berbagai ikatan budaya, serta kepentingan-kepentingan lain yang diartikulasikan sebagai identitas diri dan kelompok (Armada, 2009, 34). Lahirnya politik identitas bermula dari beberapa faktor, seperti perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas dan keinginan untuk mengedepankan prinsip kesetaraan dalam masyarakat secara umum. Selain itu, politik identitas muncul dari kepentingan anggota suatu kelompok sosial yang merasa tertindas dan terpinggirkan oleh hegemoni *mainstream* suatu bangsa atau negara.

Politik identitas sendiri merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh (Ardipandanto, April 2020, 47). Dalam filsafat, sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik

mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuan Politik Internasional di Wina pada 1994. Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Haller, 1996, ix).

## **B. POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA**

Politik identitas diperlukan dalam negara demokrasi. Kemunculannya merupakan salah satu konsekuensi logis dari penerapan demokrasi di suatu negara yang salah satu prinsip terpenting demokrasi adalah terwujudnya hak-hak dasar masyarakat yang dilindungi oleh negara (Muhtar Haboddin, 2012, 119). Hak-hak mendasar tersebut antara lain adalah kebebasan berpendapat, yang menjamin hak setiap orang untuk menentukan pilihan politiknya terhadap suatu isu tertentu, terutama yang berdampak pada dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Kebebasan berekspresi inilah yang menjadi landasan bagi beberapa orang yang merasa memiliki kesamaan pemikiran, ideologi dan identitas tertentu, sepakat untuk membentuk suatu identitas dengan tujuan untuk mengungkapkan kepentingan berdasarkan identitas tersebut.

Identitas politik ini menjadi wujudnya, interaksi yang terjadi antara nilai-nilai utama demokrasi dengan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai lain yang telah menjadi tatanan sosial masyarakat (Muhtar Haboddin, 2012, 120). Persinggungan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai lokal yang sudah ada dalam masyarakat serta semakin besarnya kesadaran seluruh masyarakat dalam berdemokrasi, yang harus menjunjung tinggi hak-hak dasarnya, menjadikan politik identitas dengan cepat bersemi dan berkembang serta menjadi bagian dari demokrasi.

Namun lahirnya politik identitas telah mendapat banyak perhatian dan wawasan dari banyak ilmuwan sosial. Hal ini dikarenakan para ilmuwan sosial khawatir bahwa politik identitas merupakan tantangan sekaligus hambatan bagi demokrasi karena dapat menyebabkan masyarakat terpecah belah dan terpolarisasi berdasarkan identitas masing-masing, sehingga secara langsung mengancam nasionalisme dan pluralisme negara (Armada, 2009, 34). Namun tak sedikit pula yang berpendapat bahwa politik identitas tidak mengancam nasionalisme dan pluralisme negara, jika para ilmuwan politik menganggap konsep tersebut sebagai sarana agar politik identitas tidak menjadi penghambat demokrasi itu sendiri.

Riyanto dalam karyanya buku Filsafat Politik mengacu pada politik identitas, di garda depan politik (Riyanto, 2011, 123). Namun politik identitas adalah titik awal pengelolaan hidup berdampingan. Jika melihat terbentuknya negara ini, hal pertama yang dianggap sebagai persoalan status adalah pertanyaan “siapakah manusia bangsa Indonesia”. Para pendiri bangsa kita berhasil mengatasi banyak rintangan awal dalam menemukan identitas nasionalnya. Riyanto juga mengungkapkan dalam bukunya bahwa “melangkah jauh mengatasi sekat-sekat primordial” berarti identitas tidak dimaknai secara personal, melainkan antar manusia; bukan antar kelompok atau kelompok, melainkan secara keseluruhan (Riyanto, 2011, 124). Dengan demikian, “melangkah jauh mengatasi sekat-sekat primordial” juga berarti perasaan menjadi sebuah bangsa secara keseluruhan. Identitas juga merupakan realitas yang mencakup prinsip persaudaraan, ketetanggaan, solidaritas, dan dialog.

Di Indonesia sendiri, banyak isu terkait politik identitas yang mengemuka. Di sini, politik identitas lebih berkaitan dengan etnis, agama, ideologi, dan kepentingan lokal, yang biasanya diwakili oleh elit yang diartikulasikan sendiri. Faktanya, politik identitas sebagian besar menjadi dasar gerakan untuk menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan yang sejalan dengan kepentingan identitasnya (Muhtar Haboddin, 2012, 121). Kita melihat bagaimana wujud politik identitas keagamaan diwakilkan oleh kelompok seperti Hizbuttahrir Indonesia yang dengan konsep Daulah Khilafiah berupaya menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Atau Front Pembela Islam yang diartikan sebagai bentuk radikalisme Islam akan melakukan segala cara, bahkan kekerasan, untuk menegakkan hukum Islam. Banyak pihak yang menganggap kebijakan identitas berbasis agama ini merupakan ancaman terhadap pluralitas dan integrasi bangsa Indonesia. Selain kebijakan identitas berbasis agama, asal usul etnis kerap menjadi dasar kebijakan identitas di Indonesia (Ardipandanto, April 2020, 48).

Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis dan budaya yang masing-masing memiliki nilai, sudut pandang, identifikasi, dan kearifan tersendiri. Tentunya setiap suku juga mempunyai cara berbeda dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem demokrasi yang diperkenalkan di Indonesia untuk melestarikan suku dan budayanya. Ada yang mengutarakan identitas etnisnya namun tetap berusaha mengikuti jalur nasionalisme Indonesia, ada pula yang mengungkapkan ekspresi ekstrim untuk menunjukkan ketidaksetujuannya dan ingin melepaskan diri dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Ardipandanto, April

2020, 48). Ungkapan seperti “Presiden Indonesia harus orang Jawa”, “Sudah Saatnya Pimpinan Sunda Menjadi Presiden” merupakan contoh ungkapan terkait politik identitas etnik, namun tetap menjadi bagian dari keutuhan bangsa. Hal ini tentunya menjadikan kajian politik identitas etnik menjadi sangat penting untuk menghindari ekspresi politik identitas yang berlebihan yang dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia, namun menyalurkannya sebagai ekspresi politik identitas yang dapat membantu Indonesia dalam perjalanannya menuju ke arah yang lebih baik. Indonesia. demokrasi yang mampu mengadaptasi kearifan lokal di Indonesia dan mempertimbangkan segala manfaatnya (Armada, 2009, 34).

#### **a) Tantangan Politik Identitas Di Indonesia**

Politik identitas, jika fokus pada kesetaraan, memicu konflik yang timbul dari adanya kelompok superior dan inferior, atau yang lazim dipahami sebagai kelompok mayoritas dan minoritas (Hutapea dkk., Juni 2023, 430). Di sisi lain, ada hal positif dalam politik identitas, jika tujuannya untuk melestarikan budaya agar budaya tersebut tidak hilang, namun dengan adanya perbedaan di negara yang multikultural maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, harus diutamakan, selain itu agama dan suku juga memegang peranan (Widyawati, 2021). Di sini tugas negara adalah mencegah adanya kelompok-kelompok, jika terjadi saling diskriminasi, dimana kelompok itu membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan harus dikendalikan untuk menjaga keharmonisan bangsa dan negara. Konteks kemerdekaan tidak “berlebihan” karena merupakan amanah para pendiri yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dinamika berikut mulai menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka ingin menunjukkan jati dirinya. Seiring dengan munculnya dan tumbuhnya banyak pihak, serta organisasi keagamaan baru yang memungkinkan terjadinya konflik identitas, maka “keutamaan putra daerah” sering disebut-sebut (Arwiyah dan Machffiroh, 2014) dan yang akan diusung masing-masing calon untuk maju pada pemilu 2024.

*Potensi peningkatan konflik*, Politik identitas dalam pemilu 2024 yang sudah berlalu mempunyai tantangan yakni partai politik sebagai elemen kunci dalam proses pencalonan tentunya harus bisa berperan penting dalam proses pembentukan kekuatan. Pertama, ketegangan politik dalam negeri dapat menyebabkan konflik, terutama jika terjadi antara pemerintah dan oposisinya, atau antara kelompok etnis atau agama tertentu. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, pemilihan yang kontroversial, atau ketidakadilan dalam sistem politik dapat menyebabkan ketegangan yang dapat mengarah pada konflik. Kedua, perubahan ekonomi yang tidak merata

dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran, dan ketidaksetaraan pendapatan dapat menyebabkan protes dan konflik sosial. Ketiga, konflik dapat muncul antara negara atau kelompok etnis yang bersaing untuk mengakses sumber daya tertentu, seperti air, energi, atau lahan pertanian. Terakhir, konflik dapat diperburuk oleh ketegangan geopolitik antara negara-negara besar atau regional. Ketegangan ini dapat terkait dengan ideologi, wilayah, atau kepentingan strategis. Konflik kekuatan, konflik di perbatasan, atau intervensi asing dalam urusan dalam negeri suatu negara dapat terjadi. Tanpa pembentukan kekuatan partai yang baik, proses pencalonan tentu akan sulit bagi partai itu sendiri. Dengan demikian, *power building* merupakan upaya yang dilatarbelakangi untuk membentuk kesatuan kepribadian dan kekuasaan untuk melatih orang lain secara intensif guna mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan.

Tentu saja tugas calon untuk bekerja dalam organisasi dan mensejahterakan organisasi merupakan kekuatan hidup di masa depan (Harahap, 2017). Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pendirian partai politik, yaitu pertama, partai politik masih kurang dipilih oleh para pencari bakat untuk melakukan kiprah politik sebagai lembaga demokrasi. Kedua, masih kurangnya dana yang dimiliki partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda, karena para pemilih muda dan pimpinan partai mengambil materi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Hutapea et al., Juni 2023, 431). Beberapa rekomendasi terkait partai politik, seperti perlunya pengaturan keuangan partai politik yang cukup transparan dan berkeadilan, diharapkan ada aturan untuk pencalonan calon partai, agar lebih dari satu. Kandidat pemilih yang cerdas untuk menyelenggarakan pelatihan pra-kandidat di partai politik ke depannya, mendanai lembaga yang terakreditasi, terakhir mempublikasikan calon daerah terkait kasus pidana agar pemilih mengetahui calon yang menghadapi permasalahan hukum (Utara, 2018).

*Polarisasi diskriminasi*, Polisasi diskriminasi adalah istilah yang mengacu pada pembagian masyarakat menjadi kelompok yang saling bertentangan secara ideologis atau sosial, yang seringkali menyebabkan lebih banyak ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Ini menciptakan pembagian di antara berbagai kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial ekonomi. Polarisasi ini meningkatkan diskriminasi, meningkatkan ketegangan, permusuhan, dan kebencian antara kelompok tersebut. Ini tidak hanya merugikan korban diskriminasi, tetapi juga merusak kohesi sosial dan menghalangi kemajuan menuju masyarakat yang lebih adil dan

inklusif. Pemilu juga merupakan sebuah proses yang mensyaratkan pentingnya jumlah suara. Kebutuhan akan jumlah suara untuk memenangkan proses pemilu sangat mempengaruhi strategi pemenangan. Salah satu cara yang sangat mudah untuk mendapatkan suara massal adalah dengan menggunakan politik identitas. Cara sederhana ini tentu sangat menguntungkan partai politik yang lemah dalam pembentukan kader dan pengangkatan (Hutapea et al., Juni 2023, 431). Minimnya figur yang mumpuni tentu berdampak pada kecenderungan partai politik yang menggunakan politik identitas. Identitas berbasis SARA tentunya menjadi bahan baku efektifnya penggunaan politik identitas untuk menggerakkan massa agar memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam proses pemilu.

*Meningkatkan kesenjangan.* Melebarnya kesenjangan sosial, ekonomi, atau politik disebut sebagai peningkatan kesenjangan. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, kebijakan publik yang tidak adil, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang. Ketidaksetaraan yang meningkat dapat menimbulkan frustrasi, perasaan tidak adil, dan ketegangan sosial. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang memprioritaskan pemberdayaan ekonomi, akses yang adil ke sumber daya, dan kebijakan yang mengutamakan keadilan dan inklusi sosial. Politik identitas mulai dari tahap kampanye, di sini diharapkan fokus dan arah, membentuk tim yang jujur memantau pergerakan calon dan calon, menghindari pelanggaran dalam kampanye, apalagi jika menunjukkan sikap terkait identitas SARA dan mengecualikan kelompok lain yang tidak ada kaitannya dengan calon peserta pemilu atau pilkada ke depannya (Hutapea et al., Juni 2023, 431).

#### **b) Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2024 Di Indonesia**

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi setiap lima tahun mengadakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum. Tujuan sebuah pemilihan umum adalah untuk memungkinkan warga negara sebuah negara demokratis untuk secara bebas menentukan siapa yang akan mewakili dan mengatur tata kelola pemerintahan dengan harapan bahwa dapat mensejahterakan masyarakatnya. Negara Indonesia berada pada tahun demokrasi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah berlalu. Pemilihan Presiden tahun 2024 telah menjadi sorotan utama di kalangan masyarakat Indonesia. Karena adanya berbagai kontroversi di berbagai pihak. Menjelang pilpres negara kita sedang tidak baik-baik saja. Untu itu

pada bagian ini penulis mencoba memberikan upaya mengatasi politik identitas pasca pemilu 2024, mengurangi politik identitas yang destruktif terkait pemilu 2024 sebagai berikut;

*Pertama, mengedukasi,* Mempelajari politik identitas melibatkan pemahaman tentang bagaimana pandangan politik seseorang dipengaruhi oleh identitas seperti suku, agama, gender, atau orientasi seksual. Ini juga melibatkan peningkatan kesadaran tentang kompleksitas hubungan antara identitas dan kebijakan politik serta dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan pendidikan politik identitas adalah untuk menanamkan rasa terima kasih, menghargai keberagaman, dan kemampuan untuk menerima perspektif yang berbeda. Memperkuat inklusi sosial, mengurangi polarisasi, dan membangun masyarakat yang lebih bersatu dan adil adalah bagian penting dari upaya ini (Samosir, Mei 2022). Perlakuan terhadap kebijakan identitas yang ada, penulis juga menyarankan pentingnya prinsip martabat manusia dalam keinginan mayoritas. Jika mengacu pada politik identitas yang memisahkan kelompok mayoritas dan minoritas, maka dapat dipahami bahwa ukuran kekuasaan yang diterapkan oleh kelompok mayoritas bukanlah ukuran yang membenarkan kesalahan kelompok mayoritas, karena bersifat sementara. Oleh karena itu, kemauan mayoritas harus ditentukan melalui kesepakatan bersama berupa asas atau asas yang diterima bersama (Pancasila) untuk menunjukkan nilai demokrasi. Perjanjian tersebut memuat tugas terpenting untuk memperkuat keamanan nasional, mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua orang, terutama dalam pemilu (Prasetyo dan Muhammad, 2020).

*Kedua, membangun dialog.* Membangun dialog berarti memberi orang ruang untuk mendengarkan, berbicara, dan memahami perspektif yang berbeda dengan hormat. Ini mencakup kemampuan untuk melawan keegoisan dan prasangka pribadi serta mendorong sikap yang berempati dan memahami. Membangun dialog merupakan langkah penting dalam memecahkan konflik, memperkuat kohesi sosial, dan membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam. Dialog yang efektif memungkinkan pihak-pihak yang berbeda untuk saling belajar, mencapai kesepakatan, dan menemukan cara yang adil dan berkelanjutan untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Kondisi ini juga penting karena pemilihan parlemen dilakukan secara langsung dan oleh masyarakat tanpa perwakilan. Hal ini memaksa pendidikan politik menjadi penting bagi setiap orang. Jika dilihat dari pendidikan politik dan permasalahan yang ada, maka penyebab terjadinya perbedaan makna politik disebabkan oleh beberapa faktor, karena di satu sisi masih ada masyarakat yang merasa belum merasakan kehadiran partai politik yang memberikan manfaat bagi

dirinya. Pembangunan dan kesejahteraan hingga saat ini masyarakat belum memahami peran partai politik di tanah air. Oleh karena itu, perlu adanya struktur dan kader partai di semua tingkatan untuk memberikan pendidikan politik. Kehadiran partai politik tentu bisa dirasakan oleh masyarakat jika partai politik menyelesaikan persoalan nyatanya sedemikian rupa sehingga masyarakat terbuka terhadap kesadaran politiknya. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat juga memahami bahwa semua partai politik mengetahui dan memperoleh makna baru dalam kaitannya dengan partai politik yang kompeten (Daryanto, 2019).

*Ketiga*, penguatan institusi demokratis. Lembaga-lembaga yang mendukung sistem demokrasi, seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, harus diperkuat untuk memperkuat institusi demokratis. Memperkuat institusi demokratis juga berarti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik. Memperkuat institusi demokratis juga berarti memperkuat aturan hukum, menjaga lembaga demokratis independen dari intervensi politik, dan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Langkah-langkah ini membantu stabilitas politik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan representasi yang adil dan inklusif dalam pengadilan.

Pendidikan politik diharapkan mampu mengurangi dampak destruktif politik identitas dalam praktik pemilu. Hal ini didukung oleh nilai-nilai kognitif dan afektif yang digalakkan dalam masyarakat, yang memiliki aspek yang mengurangi dampak politik identitas yang destruktif (Alfaqi, Agustus 2015). Nilai-nilai politik pendidikan yang dapat digalakkan dalam masyarakat terkait dengan politik identitas destruktif adalah toleransi dan pluralisme. Terkait pendidikan politik, penulis memahami bahwa kesadaran politik warga negara harus ditekankan. Situasi yang diciptakan oleh pendidikan politik merupakan kesadaran kritis akan keberadaan warga negara Indonesia yang berdaya saing dan kuat. Pendidikan politik dibedakan menjadi dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan politik formal dan pendidikan politik informal (Jurdi, 2020). Pendidikan politik formal dimulai melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menyadarkan masyarakat bahwa toleransi diperlukan dan bahwa situasi pluralistik di Indonesia tidak dapat dihindari tetapi dihadapi dengan pendidikan politik yang tepat, sedangkan pendidikan politik informal dengan transparansi tugas dan tugas yang harus dilakukan tidak dapat dihindari. (Alfaqi, Agustus 2015).

*Keempat*, orang muda pengawas demokrasi. Pengawas demokrasi muda adalah agen perubahan yang penting untuk menjaga integritas proses politik. Mereka mengawasi pemilihan umum, mendorong pemilih muda untuk berpartisipasi aktif, dan melawan kecurangan dan kecurangan. Mereka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik dengan menggunakan teknologi dan jejaring sosial. Pengawas demokrasi muda mendorong perubahan dalam tata kelola demokratis dengan menekankan keadilan, inklusi, dan kebebasan berpendapat. Mereka membawa semangat dan perspektif baru untuk memperkuat fondasi demokrasi di dunia yang berkembang cepat. Peserta dalam pendidikan politik tentunya menjadi penjaga kemajuan demokrasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pendidikan politik terdapat sinergi antar komponen bangsa, namun secara khusus menjadi tanggung jawab warga berbagai pihak, misalnya partai politik, KPU masyarakat dan media massa. Oleh karena itu, demi perdamaian di Indonesia, perlu adanya kerja sama antara lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan media untuk saling mendukung agar pemilu mendatang berjalan dengan lancar dan lancar (Samosir, Mei 2022).

### **C. POLITIK IDENTITAS: MEMBANGUN SOLIDARITAS ATAU MEMECAH BELAH MASYARAKAT**

Politik identitas telah menjadi salah satu isu yang sangat kontroversial dan relevan dalam dinamika sosial dan politik kontemporer. Dalam konteks politik, identitas merujuk pada bagaimana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri berdasarkan karakteristik tertentu seperti agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, atau latar belakang sosio-ekonomi (Lestari, Desember 2018, 26). Dalam beberapa dekade terakhir, politik identitas telah menjadi kekuatan yang mendorong perubahan politik, baik secara positif maupun negatif, di berbagai belahan dunia. Salah satu argumen yang sering muncul adalah apakah politik identitas membantu membangun solidaritas di antara kelompok-kelompok yang berbeda atau malah memecah belah masyarakat. Di satu sisi, pendukung politik identitas berpendapat bahwa mengakui dan memperjuangkan hak-hak kelompok-kelompok minoritas atau terpinggirkan adalah langkah penting menuju inklusi sosial yang lebih baik (Lestari, Desember 2018, 26). Mereka berargumen bahwa dengan memberikan perhatian khusus pada identitas-identitas ini, masyarakat dapat membangun solidaritas yang lebih kuat di antara berbagai kelompok. Namun, di sisi lain, kritik terhadap politik identitas menyatakan bahwa fokus yang terlalu besar pada identitas tertentu dapat memecah belah masyarakat. Hal ini terutama terjadi ketika politik identitas digunakan sebagai alat untuk memperkuat perpecahan

antara kelompok-kelompok, yang sering dimanipulasi oleh politisi atau kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan politik mereka (Al-Farisi, Februari 2018).

Penting untuk diakui bahwa politik identitas tidak selalu berjalan satu arah. Terdapat situasi di mana politik identitas dapat membangun solidaritas di antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau minoritas. Namun, ada juga situasi di mana politik identitas justru memperdalam kesenjangan dan memecah belah masyarakat (Al-Farisi, Februari 2018). Konteks sosial, politik, dan budaya setempat memainkan peran kunci dalam menentukan dampak politik identitas. Salah satu contoh positif politik identitas adalah gerakan Hak-Hak Sipil di Amerika Serikat pada abad ke-20 (Lestari, Desember 2018, 26). Gerakan ini membawa perubahan signifikan dalam hal hak-hak dan perlindungan bagi warga Amerika Serikat yang sebelumnya terpinggirkan, seperti warga kulit hitam. Melalui mobilisasi politik identitas, gerakan ini berhasil memperjuangkan hak-hak sipil dan membangun solidaritas di antara berbagai kelompok minoritas untuk mencapai tujuan bersama.

Namun, ada juga contoh negatif di mana politik identitas memperdalam perpecahan. Misalnya, di beberapa negara yang dilanda konflik etnis atau agama, politik identitas sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkuat kontrol politik mereka dengan menghasut ketegangan antarkelompok (Saputro, Desember 2018). Dalam kasus-kasus seperti ini, politik identitas tidak hanya gagal membangun solidaritas, tetapi juga memperdalam pertentangan dan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara politik identitas yang memperjuangkan inklusi sosial dan keadilan dengan politik identitas yang dimanipulasi untuk kepentingan politik sempit.

Memahami bahwa identitas merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan masyarakat adalah langkah awal yang penting (Saputro, Desember 2018). Namun, upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa politik identitas digunakan sebagai alat untuk membangun solidaritas dan inklusi, bukan untuk memecah belah masyarakat. Ini membutuhkan pendekatan yang holistik, di mana politik identitas dipandang sebagai bagian dari kerangka kerja yang lebih luas untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Maariif, (2012). Di akhir, politik identitas bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya atau diterima tanpa kritis. Sebagai gantinya, kita perlu mengevaluasi peran politik identitas dalam konteks spesifiknya dan memastikan bahwa penggunaannya sejalan dengan nilai-nilai inklusi, keadilan, dan solidaritas.

Hanya dengan pendekatan yang hati-hati dan kritis, politik identitas dapat menjadi alat untuk membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif bagi semua warganya

## **KESIMPULAN**

Pluralisme bangsa Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang seharusnya dapat dikapitalisasi menjadi sumber kekuatan politik untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat namun tetap harus ramah dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, penguatan ideologi negara “Pancasila” menjadi keniscayaan yang harus segera dilakukan oleh negara. Hanya dan mungkin satu-satunya jalan melalui konsepsi “Politik Kebhinnekaan” yang akan menjabarkan secara praktis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik negara dan politik kebangsaan sebagai antitesis dari Politik Identitas yang lebih rentan untuk disalahgunakan oleh elite-elite politik yang tidak memahami jiwa dan semangat nasionalisme kita. Agama, merupakan identitas pertama dan utama yang paling rentan ‘rawan’ untuk disalahgunakan dalam praktik Politik Identitas di republik yang kita cintai ini. Simbolisme agama dalam politik negara dan politik kebangsaan merupakan pekerjaan rumah kita bersama yang belum tuntas dirumuskan jawabannya, sejak merumuskan dasar negara di awal kemerdekaan pertarungan ‘benturan’ ideologis antara agama dan politik tidak terelakkan telah mewarnai proses kesepakatan politik untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Akhirnya, untuk memenangi pertarungan politik ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan pemikiran dan langkah-langkah yang jauh lebih strategis dari negara untuk mengelola keragaman bangsa, pluralisme, dan menata kembali hubungan dinamis antara agama dan Pancasila melalui penguatan ideologi negara dan menggelorakan kembali jiwa serta semangat nasionalisme secara lebih kreatif dan efektif. Oleh karena itu, pentingnya peran negara. Bukan hanya sekadar menghadirkan negara, tapi harus mampu menjalankan fungsi-fungsi secara aktif dalam menjaga dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penyalahgunaan praktik Politik Identitas yang cenderung dibiarkan, merupakan bukti kalau negara tidak berdaya bahkan hampir “kalah” dalam menjalankan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agnes Heller and Sonja Puntsher Riekmann, 1996 *Biopolitics: The Politics of The Body, Race and Nature*, Brookfield: Avebury.
- Agus Saputro, (Desember 2018), *Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019*, Jurnal *Asketik* Vol. 2 No. 2
- Ahmad Syafii Maarif, (2012), *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Demokrasi Project.
- Arwiyah, M. Y., & Machffiroh, R. (2014). *Civic Education di Perguruan Tinggi Indonesia*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Aryojati Ardipandanto, Mei 2020 *Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme*, *Politica* Vol. 11 No. 1
- Bahtiar. (12 April 2023). *Power point Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas Destruktif*. Jakarta: Kemendagri.
- Daryanto, T. (2019). *Partai Advokasi (Menghapus Dominasi Uang dalam Politik*. Depok: Penerbit LP3ES, anggota IKAPI.
- Denny Najoran, 2020, "Memahami Hubungan Religiusitas dan Spritualitas Di Era Milenial." *Jurnal Education Christi* No. 1.
- Harahap, I. H. (2017). *Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan Nasional*. Universitas Bakrie, Jakarta, 1-2.
- Hutapea, dkk, Juni 2023, "Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1.
- Jurdi, F. (2020). *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: KENCANA.
- Leli Salman Al-Farisi, (Februari 2018) *Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila*, *JURNAL ASPIRASI* Vol. No. 2
- Mifdal Zusron Alfaqi, (Agustus 2015), *Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 2.
- Muhtar Haboddin, 2012, *Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal*, *Jurnal studi pemerintahan*, Vol. 3 No. 1.

*Yohanes Mba Malo Sali, Politik Identitas di Indonesia: Membangun Solidaritas Atau Memecah Belah Masyarakat, Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL), Vol 3 Issue 2 No 2, April 30, 2024*

Osbin Samosir dan Indah Novitasari, (Mei 2022) Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024, Jurnal ilmu hukum humaniora dan politik, Volume 2, Issue 3,

Prasetyo, T., & Muhammad. (2020). Filsafat Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Riyanto, Armada. (2009), Politik, Sejarah, Identitas, Postmodernitas, Malang:Widya Sasana Publication.

Riyanto, Armada. 2011, Berfilsafat Politik, Jakarta: Kanisius.

Utara, T. U. (2018). Laporan Kajian Evaluasi Pilkada dan Focus Group Discussion (FGD) Series. Medan, Sumatera Utara: Bagian Kerjasama Antar Lembaga Biro Perencanaan dan Data KPU RI.

Widyawati. (2021). menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis. Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2021, 68.

Yeni Sri Lestari, Desember 2018, Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama, Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 1.

## **DINAMIKA POLITIK DI DALAM TATA KUASA LAHAN DI DESA TANJUNG MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Nur Fhadilah<sup>1</sup>, Yenrizal<sup>2</sup>, Yulion Zalfa<sup>3</sup>**

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: nurfhadilah2705@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The research is called "Political Dynamics in Land Tenure in Tanjung Menang Village, District. OIC", and the goal of this research is to find out the pattern of control and political dynamics in land administration in Tanjung Menang village, district. OIC. The research method used is qualitative, and the data collection technique used is by reading literature, which can be processed and collected from various data sources, such as books, articles, and interview reports.*

**Keywords : Political Dynamics, Land, Society**

### **ABSTRAK**

Pada penelitian ini akan berfokus pada dinamika politik di dalam tata kuasa lahan di desa tanjung menang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan literatur yang dapat diolah dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik dan pola penguasaan lahan di desa Tanjung Menang, kabupaten OKI.

**Kata Kunci : Dinamika Politik, Lahan, Masyarakat**

### **PENDAHULUAN**

Penelitian ini menyelidiki masalah yang terkait dengan tata kuasa lahan di desa Tanjung Menang. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada fenomena atau masalah konflik yang menggambarkan dinamika politik tentang tata kuasa lahan karena ada perselisihan paham tentang hak atas lahan. Selain itu, konflik ini juga menggambarkan dinamika politik tentang tata kuasa lahan.

Problem yang muncul adalah penguasaan lahan di wilayah desa Tanjung Menang yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit. Perusahaan ini mengklaim akan menguasai sebagian besar lahan yang dimiliki desa Tanjung Menang, yang telah disepakati untuk dibangun oleh perusahaan kelapa sawit. Penguasaan lahan merupakan bagian penting dari politik agraria Indonesia. Penguasa selalu menggunakan tanah sebagai alat politik. Perubahan pola penguasaan tanah

menyebabkan struktur sosial masyarakat pedesaan juga berubah.

Menurut Konstitusi Indonesia, yang tercantum dalam UUD 1945, kekayaan alam seperti bumi, air, dan air harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanah tersebut gagal dalam praktiknya. Dalam perselisihan penguasaan lahan, para pihak yang berselisih berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan satu sama lain. Di sisi lain, situasi ini dapat berdampak negatif pada masyarakat Indonesia karena fakta bahwa masyarakat saat ini menghadapi banyak ketimpangan, termasuk ketidakadilan hukum, kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan, dan dinamika kehidupan lainnya.

Dinamika seperti ini sudah biasa terjadi di pedesaan, terutama di desa-desa yang berpusat pada kehidupan agraris di mana lahan adalah dasar kegiatan perekonomian dan sosial. Permasalahannya adalah bagaimana status kepemilikan dan penguasaan lahan berubah, yang berdampak pada kehidupan masyarakat pedesaan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaturan yang berkaitan dengan hak penguasaan atas tanah ditetapkan oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penguasaan tanah mencakup hubungan antara individu, badan hukum, atau masyarakat sebagai suatu kolektivitas dengan tanah yang dihaki, yang menghasilkan hak dan tanggung jawab. Penguasaan tanah dapat bersifat permanen atau sementara. Pihak berkuasa mendapat manfaat dalam konteks penguasaan tanah.

Jika seseorang mengalami perubahan kepemilikan atau penguasaan atas sebidang lahan, hal itu memiliki dampak yang signifikan terhadap sumber mata pencaharian mereka, status sosial mereka, dan kegiatan sehari-hari mereka. Perubahan ini dapat terjadi karena hilangnya atau munculnya hak atas sebidang lahan, atau keduanya dapat terjadi melalui beragam cara. Tidak jarang, karena nilai lahan sangat penting bagi masyarakat, banyak orang ingin mendominasi tempat tersebut, bahkan dengan berbagai cara. Hal ini terjadi di Desa Tanjung Menang, di mana dominasi tata kuasa lahan dilakukan melalui klaim kepemilikan dan kekuasaan yang sering terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah rangkaian tindakan sistematis yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan membuat kesimpulan tentang bagaimana menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian membantu merencanakan dan melaksanakan penelitian dengan baik. Pemilihan subjek penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian adalah semua bagian dari metode penelitian. Peneliti harus memilih metode penelitian yang tepat untuk tujuan dan jenis penelitian. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami

fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara menyeluruh dan secara spesifik dengan menggunakan berbagai metode alamiah disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Data penelitian adalah segala bentuk fakta dan angka yang dapat digunakan untuk membuat informasi. Dengan demikian, fakta dalam bentuk apa pun dapat digunakan sebagai data penelitian, dan sumbernya dapat berasal dari sumber mana pun yang dapat dipercaya. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi adalah sumber data dari penelitian penulis.

Tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data; tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan penelitian ini :

1. Observasi : Observasi adalah metode pengumpulan data yang unik dibandingkan dengan metode lain. Observasi tidak terbatas pada orang; itu termasuk objek alam lainnya. Peneliti dapat mempelajari perilaku dan maknanya melalui observasi. Penelitian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.
2. Wawancara : Wawancara adalah proses berbicara dalam dua arah untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang relevan. Wawancara adalah peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi atau pertanyaan secara langsung tentang subjek yang diteliti. Wawancara bebas terpimpin adalah jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti karena tetap mengikuti standar wawancara yang sudah ditetapkan. Saat wawancara, pertanyaan akan berkembang. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian.
3. Studi Dokumentasi : Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, gambar, dan laporan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen dapat digunakan sebagai pengganti metode observasi atau wawancara; mereka akan lebih dapat dipercaya atau kredibel jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

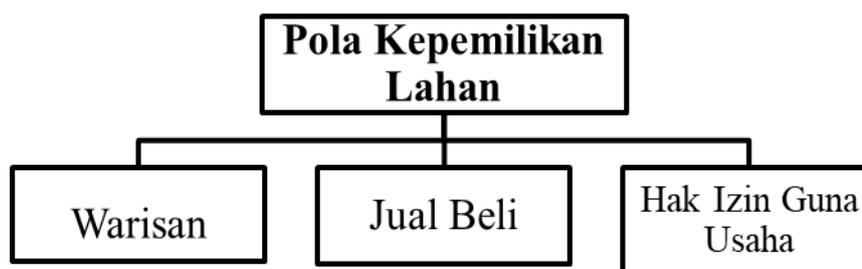
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam subunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh individu dan orang lain. Pada analisis data tersebut menggunakan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN DISKUSI

Desa Tanjung Menang terletak di sepanjang Sungai Batanghari. Desa ini adalah rumah bagi risan, sungai kecil yang berasal dari alam. Di daerah desa Tanjung Menang, empat risan, Risan Udang dan Risan Mutar, mengalir ke sawah warga di daerah sabang, atau daerah sebrang ulu. Ketika debit air tinggi, air mengalir ke sawah warga, dan ketika debit air rendah, air mengalir ke sungai komering melalui risan mutar. Setelah perusahaan kelapa sawit masuk ke desa ini dan membuat kanal besar, sirkulasi air menjadi tidak normal. Akibatnya, sawah tidak dapat digarap lagi, dan lebak lebung menjadi rusak.

**Gambar 1 : Bagan Pola Kepemilikan Lahan**



*Sumber : Oleh Penulis, 2023*

### **Pola Kepemilikan Lahan**

Sangat jarang terjadi di Desa Tanjung Menang perselisihan atau konflik terkait penguasaan lahan antara warga. Karena kebanyakan tanah di desa Tanjung Menang dimiliki atau dikuasai melalui warisan keturunan atau jual beli sah, sistem jual beli sah juga dilakukan dengan syarat dan surat-menyurat yang sah, tidak seperti perangkat desa sebelumnya. Masyarakat Tanjung Menang biasanya memiliki kepemilikan lahan perorangan. Ada tiga cara berbeda untuk memiliki tanah atau lahan di Desa Tanjung Menang.

Pertama adalah warisan, di mana tanah yang diwariskan dibagi antara ahli waris. Karena pola ini, pemilikan lahan semakin sempit dari generasi ke generasi, yang dikenal sebagai marjinalisasi pemilikan lahan. Pada titik tertentu, pemecahan pemilikan lahan dianggap tidak efektif lagi untuk ditanam di pertanian, karena petani lebih cenderung menjualnya atau mengonversikannya menjadi

*Nur Fhadilah, Yenrizal, Yulion Zalfa, Dinamika Politik Di Dalam Tata Kuasa Lahan Di Desa Tanjung Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, JSIPOL, Vol.3 Issue.2 No.3, April 30, 2024*

perumahan. Pola kepemilikan dengan sistem waris agar sertifikat dan surat waris legal.

Kedua, melalui jual beli sah; di sisi lain, petani kaya membeli dan menampung lahan sempit untuk mendapatkan lahan yang luas. Petani bermodal dapat membeli dan menyewa lahan untuk usaha tani. Nilai tambah yang mereka peroleh dari usaha tani dapat digunakan kembali untuk memperluas pemilikan dan penguasaan lahannya, yang menghasilkan akumulasi lahan. Hal ini dibuktikan oleh sertifikat hak milik dan diakui oleh pemerintah desa dan saksi yang relevan. Ketiga, adanya kepemilikan lahan guntai oleh penduduk luar desa (penduduk kota), yang dengan sengaja menanamkan modal dalam bentuk spekulasi atau pemilikan lahan dan usaha pertanian di desa.

Ditetapkan dalam Peraturan Nomor 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah, luas usaha pertanian di lahan sawah dapat berkisar antara 5 ha untuk daerah sangat padat dan 15 ha untuk daerah tidak padat. Sistem sewa sewa memungkinkan pengalihan hak tanah untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran tunai. Tanah tersebut kembali kepada pemiliknya setelah waktu transaksi habis. Dalam transaksi ini, penyewa diberi hak untuk mengolah, menanam, dan memanfaatkan hasil tanah tersebut sebagai hak miliknya sendiri. Namun, tanpa izin pemilik tanah, ia tidak boleh dijual atau disewakan. Istilah "sewa tanah" yang mengacu pada jual tahunan adalah pengoperasian hak untuk periode waktu tertentu. Menurut Supomo (1993), nilai sewa mencerminkan produktivitas lahan dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar lahan.

Keempat, jenis kepemilikan lahan yang terkait dengan sistem adalah izin usaha dengan surat perizinan yang diakui oleh pemerintah daerah. Dengan sistem hak izin guna usaha ini, tiga perusahaan kelapa sawit (PT) beroperasi di wilayah tersebut: PT Gading, PT Rambang, dan PT Kelantan. Konflik yang muncul di sini terkait dengan hak izin dan pembangunan perusahaan kelapa sawit. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara sebelumnya, desa Tanjung Serang sebenarnya memiliki hak izin guna usaha untuk lahan yang digundukan.

Pola kepemilikan lahan yang diterapkan di desa Tanjung Menang sebenarnya sama dengan yang ada di tempat lain di Indonesia. Mekanisme kepemilikan lahan melalui hak waris dan jual beli juga berlaku di masyarakat semende Muara Enim, Sumatera Selatan.

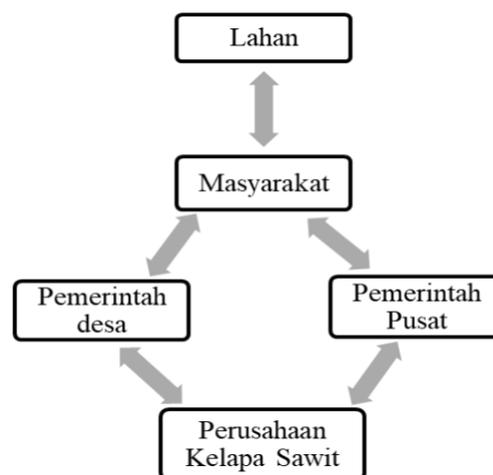
Pola kepemilikan lahan di sekitar jalan Palembang-Indralaya dan jalan Tol Parindra adalah fenomena lain yang sering terjadi. Problem yang muncul adalah kebakaran lahan yang dibiarkan terjadi oleh pemilik lahan. Pemanfaatan lahan yang dibiarkan begitu saja menimbulkan konflik yang berkelanjutan dan menimbulkan pertanyaan publik tentang siapa sebenarnya yang memiliki lahan tersebut.

Jika kita melihat kembali ke masa lalu, pengaturan dan pemanfaatan lahan sudah diatur

dengan baik selama pemerintahan marga. Saat itu, pesirah berfungsi sebagai penguasa lahan. Sebagai kepala marga warga yang ingin membuka lahan dapat mengajukan ke pesirah dengan membayar semacam pancung alas. Di sini ada banyak perjanjian yang mengikat, seperti apakah lahan akan ditelantarkan atau dibiarkan terbakar. Undang-Undang marga memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambil tindakan terhadap siapa saja yang terbukti merusak banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan.

Oleh karena itu, ada perubahan besar sejak undang-undang sertifikat hak milik mengizinkan orang untuk memiliki banyak lahan. Karena individu memilikinya, negara tampaknya kehilangan kekuatan. Namun, kuasa itu sebenarnya sudah diatur dengan baik dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Selanjutnya, apakah anda bersedia dan siap untuk membuka data lahan tersebut? Ini harus dilakukan untuk kepentingan bersama.

**Gambar 2 : Bagan Pola Penguasaan Lahan**



*Sumber : Oleh Penulis, 2023*

### **Pola Penguasaan Lahan**

Lahan di Desa Tanjung Menang dimiliki oleh tiga perusahaan kelapa sawit. Pada tahun 2000an, seluruh lahan dikuasai oleh masyarakat dan pemerintah desa Tanjung Menang, kemudian antara tahun 2003 dan 2009 PT Perusahaan Kelapa Sawit (PT Gading, PT Rambang, dan PT Kelantan) masuk. Pada akhirnya, PT ini pada akhirnya mengambil alih seluruh lahan.

Pada dasarnya, pemerintah pusat hanya memiliki hak terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang ada di desa tanjung menang. Fasilitas umum termasuk jalan desa, yaitu jalan desa menuju kota dan jalan desa ke antar desa, gapura di setiap antar desa dan RT/RW,

pembangunan masjid, dan lainnya. Contoh fasilitas sosial adalah sekolah dasar dan PAUD. Selanjutnya, fasilitas kesehatan termasuk posyandu, pos kesehatan desa (puskesmas), dan pos kesehatan pembantu (pustu).

Saat ini, masyarakat berkompetisi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah seberang (sabang). Ini menunjukkan dan menunjukkan bahwa PT Rambang dan PT Kelantan beroperasi di tanah milik Desa Tanjung Menang, tetapi mereka menerima izin dari Desa Tanjung Serang, yang merupakan desa lain. Masyarakat menetapkan batas desa untuk hak plasma. Pada wawancara penelitian, kadus dan kepala bagian pertanahan dan pertanian desa Tanjung Menang langsung memverifikasi hal ini.

Pada awalnya didirikan pada tahun 2008, PT Kelapa Sawit terdiri dari PT Gading, Rambang, dan Kelantan, yang pada saat itu diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah kemudian mengambil alih untuk mengatasi masalah tersebut. Pada awal berdirinya perusahaan, pemerintah daerah memberikan izin hak guna usaha kepadanya. Dengan SK bupati No. 555/KEP/Disbun/2007, desa Tanjung Serang menerima hak izin tersebut, dengan ketahuinya masyarakat desa Tanjung Serang.

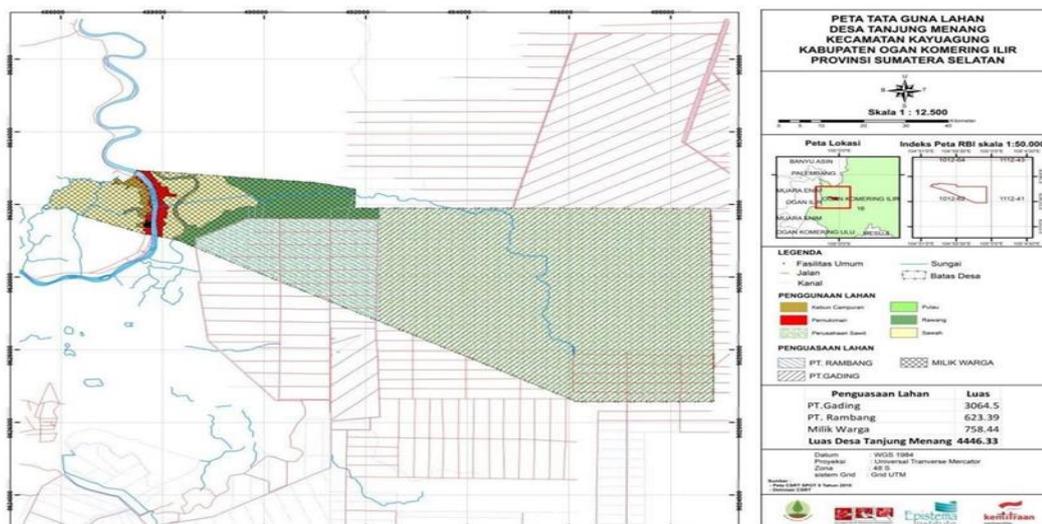
Masyarakat desa Tanjung Menang tidak menyadari bahwa lahan mereka telah diambil alih oleh perusahaan kelapa sawit. Pada akhirnya, masyarakat tersebut menuntut hak plasma mereka karena merasa diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan tanpa izin dan tanggung jawab yang adil. Masyarakat desa Tanjung Menang secara kolektif menetapkan batas lahan dan menuntut hak plasma, tetapi pemerintah daerah OKI berhasil menyelesaikan masalah ini. Kepala desa Tanjung Menang mengkonfirmasi hal ini.

Dalam hal penggunaan lahan, bisnis perkebunan di atas 25 hektar harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin usaha perkebunan serta hak atas tanah. Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh lembaga OSS (Online Single Submission) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota setelah pelaku usaha mendaftar dan untuk memulai bisnis kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasi dan komersial dengan memenuhi persyaratan dan komitmen. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), juga disebut sebagai OSS, adalah perizinan berusaha yang diberikan oleh lembaga OSS (Online Single Submission) kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran tanaman perkebunan dianggap sebagai perkebunan. Pelaku

Nur Fhadilah, Yenrizal, Yulion Zalfa, *Dinamika Politik Di Dalam Tata Kuasa Lahan Di Desa Tanjung Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir*, JSIPOL, Vol.3 Issue.2 No.3, April 30, 2024 usaha perkebunan yang diatur dalam undang-undang tersebut disebut sebagai perkebunan.

Untuk mendapatkan izin untuk menggunakan tanah sebagai tempat usaha, selain Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, juga diperlukan Hak Guna Usaha untuk memberikan izin untuk memulai bisnis di atas tanah tersebut. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk jangka waktu tertentu didefinisikan sebagai hak usaha, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Tanah negara yang dapat diberikan hak guna usaha adalah hutan produksi, yang statusnya kemudian dialihkan menjadi lahan untuk pertanian, peternakan, atau perkebunan. Hutan konservasi dan hutan lindung tidak diizinkan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan untuk tanah dengan luas sekurang-kurangnya lima hektar.

**Gambar 3 : Peta Penguasaan Lahan**



Sumber : Oleh Penulis, 2023

### **Dinamika Politik Dalam Tata Kuasa Lahan**

Peralihan tanah di Desa Tanjung Menang dilakukan di antara warga sendiri dan dilakukan dengan administrasi yang cukup baik. Pengalihannya dapat dilakukan melalui skema waris atau transaksi jual beli antara warga dengan warga lainnya dengan dokumen resmi yang diketahui oleh lembaga pemerintah lokal. Sementara itu, hak konsesi di tanah desa dimiliki oleh perusahaan dan pemerintah desa dan unsur pemerintahan.

Berdasarkan wawancara dengan kadus dan kepala bagian pertanahan dan pertanian Desa Tanjung Menang, diketahui bahwa hak atas tanah telah diberikan kepada tiga perusahaan tanpa

diketahui oleh masyarakat Desa Tanjung Menang. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketidakjelasan batas lahan antara Desa Tanjung Menang dan Desa Tanjung Serang. Izin lahan yang tercantum pada surat izin hak guna usaha untuk wilayah Desa Tanjung Serang, tetapi ada perluasan ke wilayah Desa Tanjung Menang, yang menyebabkan konflik. Perusahaan kepala sawit masuk ke desa Tanjung Menang dan mempergunakan sebagian lahan tanpa izin desa. Konflik ini berlangsung dari tahun 2008 hingga 2015.

Menurut kepala desa Tanjung Menang, konflik politik telah dan masih terjadi antara masyarakat desa dan PT. Rambang, Kelantan, dan Gading. Konflik ini terjadi karena tiga perusahaan tersebut dianggap mencaplok wilayah desa tanpa izin dari desa. Konflik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan juga muncul dalam berbagai pemberitaan. Ini karena batas desa belum selesai sejak SK bupati No. 555/KEP/Disbun/2007 tentang batas yang menunjukkan bahwa lahan yang dikelola oleh ketiga perusahaan tersebut termasuk dalam wilayah Desa Tanjung Menang, sehingga masyarakat meminta plasma dari perusahaan.

Karena dinamika politik ini, pada bulan Agustus 2019, warga melakukan penuntutan hak plasma dengan mendatangi pihak perusahaan. Camat Kayuagung dan Kapolsek berhasil mengatasi konflik tersebut. Pemerintah Kecamatan berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui perjanjian bermaterai. Dalam konteks dinamika politik, dinamika politik dapat didefinisikan sebagai gerakan yang mendorong perubahan perilaku yang direncanakan. Pada akhirnya, gerakan ini akan memberikan warna dan perubahan pada pemerintahan. Individu dan kelompok yang berinteraksi dalam suatu institusi atau lembaga politik memanfaatkan kekuatan mereka berdasarkan dinamika politik. Desakan kebutuhan partai, baik internal maupun eksternal, dan interaksi masyarakat menyebabkan dinamika ini.

Dalam kaitannya dengan politik lokal yang berkaitan dengan penguasaan lahan, perselisihan ini akan mengubah struktur kekuasaan dan agraria karena berbagai kebijakan sektor publik, termasuk program dan kebijakan pemerintah daerah, yang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah lain mengurangi ruang untuk hidup. Ini berarti bahwa kaum tani pedesaan akan mengalami migrasi besar-besaran karena mereka telah kehilangan tanah mereka karena pembangunan, dan mereka harus beralih profesi menjadi buruh tani dan tenaga kerja murah.

Pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal ketika mengubah fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, karena ini dapat menyebabkan konflik vertikal dan horizontal. Karena penguasaan tanah yang tidak stabil, agraria dalam arti sempit, atau kepemilikan tanah, menjadi masalah yang sangat penting. Ini telah menjadi pokok pangkal yang belum terurai hingga saat ini,

yaitu kepemilikan tanah oleh perusahaan dan pengusaha dalam jumlah besar dapat menyebabkan kemiskinan struktural di desa.

Dalam hal masalah tata kuasa lahan desa Tanjung Menang, nampaknya belum juga selesai. Karena fakta bahwa perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di desa Tanjung Menang memiliki hak izin usaha dari desa Tanjung Serang, yang juga memiliki lahan gambut yang luas. Pada saat pembangunan perusahaan kelapa sawit, sebagian besar lahan yang digunakan masuk ke wilayah desa Tanjung Menang, dan pembangunan perusahaan melibatkan 3 (tiga) PT sekaligus. Sebelum dibangunnya perusahaan kelapa sawit, penduduk desa Tanjung Menang menggunakan lahan gambut untuk bertahan hidup dengan menanam padi. Kemudian, masyarakat desa membuat parit langsung untuk mencari ikan untuk diolah menjadi ikan asin, karena satu-satunya bisnis di desa adalah industri ikan asin. Selain itu, sebagian dari lahan gambut ini juga digunakan untuk pertanian.

Oleh karena itu, masyarakat desa Tanjung Menang membuat batas desa mereka dan menuntut hak plasma kepada ketiga perusahaan tersebut, karena perusahaan sawit tersebut mengelola lahan yang luas, dan masyarakat desa Tanjung Menang hanya mengelola sebagian kecil.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi tentang dinamika politik dalam tata kuasa lahan desa Tanjung Menang, kab. OKI, dengan menggunakan teori Contentius di bab sebelumnya Oleh karena itu, peneliti dapat mencapai beberapa kesimpulan: Pola penguasaan lahan di Tanjung Menang. Teori penguasaan lahan dimulai dengan jenis kepemilikan lahan yang berbeda. Ini dapat berupa warisan atau turun temurun dari nenek moyang; jual beli yang sah dengan bukti surat-surat dan sertifikat hak milik yang diakui oleh pemerintah desa dan saksi terkait; dan terakhir, pola kepemilikan lahan dapat berupa izin usaha. Setelah perusahaan kelapa sawit didirikan dan beroperasi, terdiri dari tiga PT, yaitu Pembangunan perusahaan kelapa sawit telah menyebabkan lahan gambut PT Gading, Kelantan, dan Rambang menjadi tidak berfungsi. Perusahaan kelapa sawit menguasai 3.687.89 ha, atau hampir 83% dari seluruh lahan desa Tanjung Menang.

Perusahaan dianggap mencaplok wilayah desa Tanjung Menang untuk membangun perusahaan kelapa sawit tanpa izin penduduk desa. Ini adalah dinamika politik dalam tata kuasa lahan desa Tanjung Menang. Hak izin usaha yang diberikan oleh pemerintah dengan nomor SK OKI No. 555/KEP/Disbun/2007 diberikan kepada desa Tanjung Serang, tetapi pembangunan tersebut masuk ke dalam wilayah desa Tanjung Menang. Akibatnya, masyarakat desa Tanjung Menang menang dalam tuntutan hak plasma mereka kepada perusahaan kelapa sawit, yang dimediasi oleh Pemerintah OKI berjanji akan memberikan hak plasma kepada Desa Tanjung Menang, dan

Nur Fhadilah, Yenrizal, Yulion Zalfa, *Dinamika Politik Di Dalam Tata Kuasa Lahan Di Desa Tanjung Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir*, JSIPOL, Vol.3 Issue.2 No.3, April 30, 2024  
perusahaan kelapa sawit telah berjanji untuk memberi Desa Tanjung Menang lahan seluas 162 hektar.

#### **SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA**

- Alting, H. Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha. *Jurnal Konstitusi*, II(2), 266–282.
- Ananta, D. D. (2017). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1),
- Bumulo Sahrain. (2017). ‘‘Dinamika Penguasaan Lahan Dalam Masyarakat Multietnik’’. *Jurnal Sosiologi* 05, no 2
- Fajar Yana. (2015) ‘‘Dinamika Kebijakan Pengendalian Konveksi Lahan Pertanian Di Kota Sukabumi’’. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi,
- Hanum, E. R. (2017). Dinamika Konflik Tanah Timbul Di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 135–142.
- Hidayat, R. A. (1998). *Pengembangan Konstruksi Contentious Politic Theory Dalam Konstestasi Demokrasi Politik Lokal Pasca Reformasi Politik 1998*. 278–289.
- Hidayatullah Ujang Rismi Muhammad. (2021) ‘‘Penguasaan Lahan dan Penyelesaian Sengketa Lahan Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007’’. Tesis, Universitas Islam Malang, 2021.
- Indriyani. (2008). ‘‘Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha PT. Karyadeka Alam di Desa Trisobo Kabupaten Kendal’’. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- James Leo, Pasulle. (2019) ‘‘Konflik dan Resolusi Konflik Studi Kasus : Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep.’’ Skripsi, Universitas Hasanuddin (2019).
- Jumhadi. (2021) ‘‘Politik Hukum Agraria Dalam Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.’’ Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2021).
- Muhammad Fikri dan Paskarina Caroline. ‘‘Relasi Kuasa Dalam Perebutan Lahan di Situs Candi Bojongmenje’’. *Jurnal Ilmu Politik* 02, no 1 (2017).
- Raharjo Adi Khrysyanto. (2015) ‘‘Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sleman’’. Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rahman, A. (2019). *Politik Agraria*. Jambi : Media Salim Indonesia.
- Pandamdari Endang. (2022) ‘‘Analisi Hak Atas Tanah dalam Kepemilikan Sengketa Tanah Serta Penyelesaiannya.’’ *Jurnal Ilmu Politik* 01, no. 1 (2022).
- Roagaswara Andrian. (2023) ‘‘Dinamika Politik Parlemen Uni Eropa Terhadap Perdagangan

- Nur Fhadilah, Yenrizal, Yulion Zalfa, *Dinamika Politik Di Dalam Tata Kuasa Lahan Di Desa Tanjung Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir*, *JSIPOL*, Vol.3 Issue.2 No.3, April 30, 2024
- Komoditas Kelapa Sawit”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Sangadji, I. M., Lubis, D. P., & Sjaf, S. (2021). Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan*, 3(2), 333–346.
- Sekarmadji Agus dan Sri Hajati. (2014). “Model penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efesiensi”. *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no 1 (2014).
- Suhaimi, A. (2019). Pola Penguasaan dan Kepemilikan Tanah pada Kawasan Pertanian di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Wasaka Hukum: Jendela Informasi Dan Gagasan Hukum*, 7(2), 389–406.
- Sukmawati Diva Putu. (2022). “Hukum Agraria Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 02, no. 2 (2022) 91-95
- Sumarja. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*. Yogyakarta : STPN Prees Perpustakaan Nasional, 2015.
- Winarno, budi. (2019). *dinamika politik global kontemporer*. media pressindo.
- Yenrizal. (2015). Semende Darat Tengah. *Kawistara*, 5(3), 287–297
- Zalfa Yulion. (2018). *Profil Desa Peduli Gambut Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*.

## **MARKETING POLITIK AKA CHOLIK DARLIN PADA AKUN YOUTUBE AKA CHOLIK TV MENUJU PEMILU 2024**

**Tiara Yunita<sup>1</sup>, Ainur Ropik<sup>2</sup>, Siti Anisyah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: tyarayunita123@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research is entitled Aka Cholik Darlin's Political Marketing on Aka Cholik TV's Youtube Account towards the 2024 election which is motivated by political marketing carried out by Aka Cholik Darlin, he often uses social media with the YouTube platform which is often active, this marketing takes advantage of the advantages of social media in terms of ease of access for prospective voters. The aim of the research is to find out the marketing of legislative candidates in the 2024 election, Aka Cholik Darlin from the National Awakening Party via YouTube. This research uses Nifenegger's political marketing theory according to Koteen. Data comes from primary data in this research obtained from interviews, and YouTube social media on the Aka Cholik Tv account, and secondary data from supporting literature and journals regarding the research topic. The data collection technique used is searching for data and information through documents. Data analysis techniques for data reduction, data analysis, and drawing conclusions. The research results show that Aka Cholik Darlin carries out his political marketing by using YouTube as political media, discussing a lot about political campaigns, outreach to the community and the younger generation. Based on the results of the political marketing analysis on the Aka Cholik TV Youtube account, in carrying out its political marketing via Youtube Aka Cholik takes advantage of the surrounding conditions or situations. From the results of this analysis, it was found that if we look at it based on political marketing theory according to Niffenegger, in the political marketing process, the 4P marketing mix is used, and Aka Cholik only uses 2P in his political marketing, namely: First, Niffenegger divides political products into three categories, wrong The only personal characteristics in this Akacholik TV show are personal characteristics that lead to the characteristics of Aka Cholik Darlin as a leader who will provide peace to society, education and religion. Second, the promotion in political marketing on this broadcast, the promotion of Aka Cholik TV Aka Cholik, will invite the involvement of the younger generation.*

**Keywords:** *Political marketing, Aka Cholik, YouTube.*

### **ABSTRAK**

Penelitian Marketing Politik Aka Cholik Darlin Pada Akun Youtube Aka Cholik TV menuju pemilu 2024 yang dilatarbelakangi oleh strategi yang dilakukan Aka Cholik Darlin beliau sering menggunakan media sosial dengan platform youtube yang sering aktif, strategi ini memanfaatkan keunggulan media sosial dalam hal kemudahan akses bagi calon pemilih. Tujuan penelitian Untuk mengetahui strategi calon legislatif pada pemilu 2024 Aka Cholik Darlin dari Partai Kebangkitan Bangsa melalui youtube. Penelitian ini menggunakan teori marketing politik menurut Niffenegger. Data bersumber dari data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dan media sosial Youtube dalam akun Aka Cholik Tv, dan data sekunder dari literatur yang mendukung dan jurnal-jurnal mengenai topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen. Teknik analisis data reduksi data, analisis data, dan

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aka Cholik Darlin melakukan strategi politiknya dengan menggunakan Youtube sebagai media politik, banyak membahas mengenai kampanye politik, sosialisasi terhadap masyarakat dan generasi muda. Berdasarkan pada hasil analisis strategi politik pada akun Youtube Aka Cholik TV, dalam menjalankan strategi politiknya melalui Youtube Aka Cholik memanfaatkan keadaan atau situasi sekelilingnya. Dari hasil analisis tersebut didapatkan bahwa jika dilihat berdasarkan teori marketing politik menurut Firmanzah, dalam proses Political marketing, digunakan penerapan 4P bauran marketing, dan Aka Cholik hanya menggunakan 2P pada marketing politiknya, yaitu: Pertama, Niffenegger membagi produk politik ke dalam tiga kategori, salah satunya ciri pribadi dalam tayangan Akacholik tv ini yaitu ciri pribadi yang mengarah pada karakteristik Aka Cholik Darlin sebagai pemimpin yang akan memberikan kedamaian pada masyarakat, edukasi, dan keagamaan. Kedua, promosi dalam marketing politik pada tayangan tersebut promosi Aka Cholik TV Aka Cholik akan mengundang melibatkan peran generasi muda.

**Kata kunci:** Marketing politik, Aka Cholik, Youtube.

## **PENDAHULUAN**

Marketing politik adalah sebuah strategi oleh partai atau kandidat yang menggunakan penelitian jajak pendapat dan menganalisa lingkungan untuk memproduksi dan mempromosikan sebuah tawaran produk berdaya saing, yang akan membantu merealisasikan tujuan organisasi dan ditujukan untuk kelompok pemilih agar merubah pilihan suara mereka1 .Marketing politik adalah sebuah strategi yang direncanakan, disusun dalam jangka waktu panjang dan pendek dengan menggunakan riset pasar untuk mengetahui realita atau peta politik. Dari riset tersebut akan dihasilkan cara untuk membuat atau mengemas produk bernilai dan berdaya saing, serta cara untuk mempromosikan produk tersebut ke masyarakat. Produk yang baik adalah produk yang dibuat atas dasar keinginan dan kebutuhan pemilih. Tujuan akhir dari penggunaan strategi ini adalah merubah pilihan politik pemilih agar memilih kandidat tertentu (Valencia, 2019).

Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan Bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Strategi politik calon dilakukan selama yang telah ditentukan hingga menjelang hari pemungutan suara. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pemilu dengan system demokrasi, mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada (institusi primordial baik yang bersifat keagamaan ataupun ke daerah), mesin-mesinpolitik yang ada (oganisasi sosial politik atau kelompok kepentingan baik Partai politik, Organisasi Kepemudaan, dan Media), proses pencitraan,sosialisasi politik, dan strategi politik calon yang dilakukan, yang pada dasarnya hal ini adalah instrument dari serangkaian usaha pemenangan, baik dalam kondisi Pemilu ataupun Pemilukada (MPOC, lia dwi jayanti, dan Brier 2020). Hal ini lumrah terjadi sejak bergulirnya Orde Reformasi yang membuka keran terhadap proses demokratisasi di Indonesia, dimana setiap partai politik berkompetisi dalam

setiap pemilu, dan setiap partai politik memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan politik dalam pemilu.

Marketing politik merupakan cara atau taktik dalam meraih dan memperoleh sesuatu. Sehingga dalam ranah politik marketing adalah sesuatu hal yang sangat penting yang menjadi kajian menarik bagi para sarjana politik, bahkan bagi para aktivis, dan juga para politisi (Crystallography 2016). Dalam memperebutkan kekuasaan serta memperoleh kemenangan dalam pertarungan di atas pentas politik tersebut hampir seluruh organisasi politik memiliki strategi yang berbeda-beda.

Menurut (junaedi dalam Palupi, 2020) untuk memenangkan pemilu dibutuhkan rancangan marketing politik yang menarik untuk mendapatkan massa yang banyak dengan pemasaran yang tepat. Peranan publik figur merupakan cara mudah yang digunakan dalam pemasaran politik dimana popularitas digunakan untuk menarik dukungan (Rahmawati, 2020).

Marketing politik adalah sebuah strategi yang direncanakan, disusun dalam jangka waktu panjang dan pendek dengan menggunakan riset pasar untuk mengetahui realita atau peta politik. Perkembangan marketing politik di Indonesia mengalami lompatan yang cukup signifikan dari pemilu 1999, 2004, dan terakhir 2009. Hal ini adalah salah satu resonansi gelombang demokratisasi pada arus global, yaitu kebebasan pers, sehingga isu dan wacana yang terjadi di luar negeri dapat masuk dengan mudah ke Indonesia. Ditambah pula dengan berkembangnya siaran televisi swasta yang membuat masyarakat dapat mengakses berita apapun dan dimanapun. Kebebasan pers mengakibatkan efek negatif dan positif, kebebasan pers ikut andil dalam pembentukan opini publik mengenai segala hal, terutama kehidupan sosial politik. Ketika media melakukan blow up mengenai suatu isu dan menghadirkan isu tersebut ke tengah publik, maka hal itu akan dianggap penting, sebaliknya apabila media menganggap sesuatu biasa saja, maka hal itu akan dilupakan publik (Ley 25.632 2002).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu partai politik yang dibentuk pada masa Reformasi tahun 1998 tepatnya pada tanggal 21 Juli 1998. Didirikan sehari setelah runtuhnya era Orde Baru bersamaan dengan lengsernya Soeharto dari posisi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.1 Pada masa itu, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) memperoleh berbagai macam usulan dari kaum Nahdliyin di berbagai daerah di Indonesia. Banyak warga NU yang menginginkan agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik untuk mewadahi aspirasi kaum Nahdliyin di seluruh pelosok daerah di Indonesia. Pada saat itu banyak aspirasi yang bermunculan dan sempat menimbulkan konflik. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan, juga termasuk visi misi, rumusan AD/ART, hingga orang – orang yang dinilai layak menjadi pengurus parpol orang NU nantinya (Crystallography 2016).

Salah satunya yang dilakukan Bacaleg (Bakal Calon Legislatif) Partai Kebangkitan Bangsa Daerah dapil 6 Kabupaten Pali kota Prabumulih kab Muara Enim Sumatera Selatan. Aka Cholik Darlin ,Spdl,SH,MM yang biasa di panggil Holik dalam kehidupan sehari-hari mengatakan, ”Alhamdulillah saya di percaya dan di amanatkan dari PKB Sumsel untuk Bacaleg (Bakal Calon Legislatif) PKB sebagai calon dewan di DPRD Sumsel”.

Selain Aktif di Partai Politik Aka Cholik Darlin telah banyak membuat Organisasi Sosial Keislaman di antaranya Fakar Lematang ( Forum Aspirasi dan Kepedulian Rakyat Lematang ) dan Fakem Islam ( Forum Amal Kemanusiaan & Kematian Islam ) yang menyediakan Ambulan Gratis serta Satuan setiap Ada Musibah di Warga Islam Lematang ini (Aka Colik Darlin 2017). Dalam marketing politik yang dilakukan Aka Cholik Darlin beliau sering menggunakan media sosial dengan platform youtube yang sering aktif, pemasaran ini memanfaatkan keunggulan media sosial dalam hal kemudahan akses bagi calon pemilih, kandidat secara langsung dapat berinteraksi dengan calon pemilih dengan skala dan intensitas yang lebih mudah dibandingkan melalui pola kampanye tradisional seperti door to door, brosur, bahkan peliputan oleh media cetak atau televisi (Darlin 2018).



**Gambar 1. Youtube Aka Cholik Tv (2023)**

Di dalam youtube Calon legislatif Aka Cholik Darlin terlihat aktif di youtube beliau memulai bergabung di youtube tahun 16 Febuari 2013 sering mengunggah aktivitas sehari hari dari segi keagamaan blusukan daerah Pali serta kegiatan di partai kebangkitan bangsa. Marketing yang dilakukan Aka Cholik ini menguatkan karakter melalui konten YouTube yang dibagikan dan berinteraksi dengan khalayak umum. Berbagai informasi dapat tersebar luas dengan mudah dan cepat. Percepatan terbesarnya informasi dan interaksi yang dilakukan dengan masyarakat akan memperluas jangkauan kampanye yang dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Karena peneliti ingin

dapat menggali lebih dalam dan mengambil bagian dalam proses pengumpulan data, sehingga informasi sekecil apapun dapat didengarkan dan dirasakan secara seksama, terutama yang berkaitan dengan Marketing Politik Aka Cholik pada Akun Youtube Aka Cholik TV menuju Pemilu 2024. Dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe *library research* yaitu dengan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan Marketing Politik Aka Cholik pada Akun Youtube Aka Cholik TV menuju Pemilu 2024.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil video yang di unggah dari pertengahan bulan 2023 sampai awal bulan 2024 menjelang pemilu dari media sosial Youtube dalam akun Aka Cholik Tv akun milik pribadi Calon Legislatif. Sumber data untuk data primer berupa hasil penelitian Marketing Politik Aka Cholik pada Akun Youtube Aka Cholik TV menuju Pemilu 2024. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber yang sudah ada (Sugiyono 2018). Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat serta relevan dalam menjawab masalah penelitian, data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber berkaitan dengan Marketing Politik Aka Cholik pada Akun Youtube Aka Cholik TV menuju Pemilu 2024, literature yang mendukung dan jurnal-jurnal mengenai topik penelitian. Untuk memperoleh data dari penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Di era digital saat ini media sosial menjadi salah satu media yang banyak dimintai oleh sejumlah masyarakat karena informasi yang di sampaikan media sosial lebih mudah diakses oleh kalangan masyarakat. Tidak hanya menjadi media hiburan tetapi media sosial dimasa ini telah banyak digunakan sebagai sarana marketing politik karena dianggap akan lebih efektif dalam penyebarluasan informasi. Sekarang kita sudah ada di era digital terutama dimana kaum-kaum milenial banyak yang menggunakan kecanggihan teknologi dalam mencari informasi, jadi segala sesuatu yang sekarang dicari anak-anak muda sudah bersumber dari media, baik itu platform yang menggunakan youtube, jadi pada dasarnya media ini banyak digunakan. Sehingga terkait dengan marketing politik itu menjadi instrument yang sangat baik untuk menyampaikan ide, gagasan-gagasan politik, atau partai politik yang ingin memberikan kampanye melalui media sosial itu sangat menguntungkan dan efektif bagi calon legislatif dan partai politik itu sendiri.

Youtube sebagai sarana marketing politik dapat memberikan keuntungan yang besar terhadap calog legislatif untuk meningkatkan elektabilitas partainya, dan menambah Branding Partai politik tersebut. Marketing politik yang dilakukan melalui media sosial dapat menambah kedikenalan

masyarakat terhadap kandidat politik karena masyarakat dapat melihat kinerja mereka walaupun tidak secara langsung, melalui media sosial kandidat-kandidat politik tersebut dapat mengunggah aktivitas mereka di media sosial sehingga masyarakat bisa menilai kinerja mereka.

Dalam mempromosikan diri sebagai calon legislatif atau program kerja yang akan dijalankan oleh kandidat politik melalui media sosial, konten yang di unggah harus dapat dipahami oleh kalangan masyarakat, dan konten tersebut dibuat dengan semenarik mungkin untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap konten politik yang unggah. Marketing Politik di media sosial dapat mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi mengenai aktivitas Politik yang dilakukan oleh kader partai politik atau kandidat calon dari partai politik. Media sosial mempermudah kami masyarakat dalam meihat bahkan menilai setiap kandidat calon perwakilan partai yang akan ikut serta dalam kontestasi politik, tentunya itu strategi yang baik, karena perkembangan media sosial semakin hari semakin meningkat, dan sangat mudah diakses sehingga memudahkan tersebarnya Informasi.

Aka Cholik Darlin sebagai calon legislatif dari partai PKB Kabupaten Pali melakukan marketing politik dengan memanfaatkan media sosial. Aka Cholik Darlin melakukan strategi marketing politik dengan melakukan sosialisasi, kegiatan kemasyarakatan, serta memanfaatkan media sosial, salah satu media sosial yang aktif digunakan oleh Aka Cholik adalah Youtube dengan nama akun Aka Cholik TV. Berikut ini terdapat beberapa tayangan youtube aka cholik tv sebagai konten atau tayangan marketing politik, yaitu:

### **1. Kaum Muda Ingin Perubahan**

Tayangan dalam Aka Cholik TV dengan judul "Kaum Muda Ingin Perubahan". Didalamnya tayangan ini melibatkan para generasi z, dalam pertemuan yang terjadi antara Aka Cholik dan para pemuda memiliki maksud untuk mencari dukungan dari generasi muda. Aka Cholik Tv telah memberikan sebuah gambaran mengenai politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi generasi muda dalam mengartikan politik. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan tayangan kampanye politik di atas, yaitu: Generasi z., dalam hal ini dilakukan Aka Cholik karena menganggap politik tidak dekat dengan generasi z, atau tidak ada ketertarikannya generasi milenial dan generasi z dalam berpolitik. Dalam tayangan ini Aka Cholik TV juga melakukan kampanye untuk pemilihan presiden nomor urut 1. Selain itu, terlihat dalam tayangan pada Aka Cholik TV di atas, yaitu: Memberikan pengaruh pada generasi z dengan menyinggung mengenai politik praktis, dan memberikan seruan untuk memberikan perubahan pada sisi ekomoni, pendidikan, lapangan pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh Aka

Cholik Tv karena masih terdapat banyaknya pengangguran yang dialami oleh lulusan baru baik itu Menengah Atas, maupun Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pada teori Marketing politik juga menyediakan perangkat teknik dan metode marketing dalam dunia politik. Menurut Niffenegger, yaitu: Pertama, Niffenegger membagi produk politik ke dalam tiga kategori, (1) *party platform* (platform partai), (2) *past record* (catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau), dan (3) *personal characteristic* (ciri pribadi). Dalam tayangan Akacholik tv ini yaitu ciri pribadi yang mengarah pada karakteristik Aka Cholik Darlin sebagai pemimpin yang memiliki ciri yang akan memperhatikan lingkungan sekitar, yaitu politik praktis, dan memberikan seruan untuk memberikan perubahan pada sisi ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh Aka Cholik Tv karena masih terdapat banyaknya pengangguran yang dialami oleh lulusan baru baik itu Menengah Atas, maupun Perguruan Tinggi, sehingga memberikan citra, simbol, dan kredibilitas sebuah produk politik (*political product*). Kedua, promosi dalam marketing politik merupakan tahap mengiklankan produk politik seperti ide, platform partai dan ideologi selama kampanye Pemilu. Pada tayangan tersebut promosi yang dilakukan oleh Aka Cholik dengan menarik ketertarikan generasi z, pada tayangan ini, publik bisa melihat pertarungan program kerja yang ditawarkan oleh Aka Cholik untuk menarik perhatian generasi z.

## **2. Kance Tubo Menyapa #2024 Tahun Politik**

Tayangan dalam Aka Cholik TV pada tanggal 13 Oktober 2023, yang telah ditonton sebanyak 66 tayangan, dengan judul "Kance Tubo Menyapa #2024 Tahun Politik". Didalamnya tayangan ini Aka Cholik mengangkat tema pembahasan tahun politik dan tempat-tempat wisata yang ada di Pali. Dalam tayangan kampanye politik milik Aka Cholik TV pendefinisian masalah terdapat dalam kutipan berita di atas, yaitu: *2024 Comeback..* dalam tayangan ini Aka Cholik Tv telah memberikan sebuah gambaran mengenai budaya wisata, serta makam para leluhur di Pali, dan sosial politik.

Berdasarkan pada teori Marketing politik juga menyediakan perangkat teknik dan metode marketing dalam dunia politik. Menurut Niffenegger, dalam proses Political marketing, digunakan penerapan 4P bauran marketing, yaitu: Pertama, Niffenegger membagi produk politik ke dalam tiga kategori, (1) *party platform* (platform partai), (2) *past record* (catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau), dan (3) *personal characteristic* (ciri pribadi). Dalam tayangan Akacholik tv ini yaitu ciri pribadi yang mengarah pada karakteristik Aka Cholik Darlin sebagai pemimpin yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu edukasi mengenai politik hingga kebudayaan daerah setempat. Kedua,

promosi dalam marketing politik pada tayangan tersebut promosi Aka Cholik TV Aka Cholik akan mengundang para tokoh yang berasal dari segala bidang untuk mengisi tayangan Youtube di Aka Cholik tv. Hal ini bertujuan menarik perhatian masyarakat untuk menonton tayangan dengan informasi yang disampaikan oleh para tokoh.

### **3. Payuputat Bersholawat, Caleg PKB Asli Payuputat**

Tayangan dalam Aka Cholik TV pada tanggal 08 Oktober 2023, yang telah di tonton sebanyak 236 tayangan, dengan judul "Payuputat Bersholawat Caleg PKB Asli Payuputat". Didalamnya tayangan ini Aka Cholik membahas mengenai keasliannya sebagai bagian dari Payuputat. Dalam tayangan kampanye politik milik Aka Cholik TV dan menyampaikan pidato mengenai Calon Presiden nomor urut 1, serta seruan semangat kekompakan pada masyarakat Payuputat untuk memperdalam ilmu agama dan segala bidang. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan tayangan di atas, yaitu: Aka Cholik sebagai bagian asli dari masyarakat Payuputat akan memajukan wilayah tersebut dengan menjadi wakil rakyat dan tayangan pada Aka Cholik TV di atas, yaitu: argumentasi yang didapat dari tayangan Aka Cholik tersebut adalah menarik perhatian para masyarakat Payuputat dengan memberikan penegasan dan silsilah asli bahwa Aka Cholik berasal dari daerah tersebut.

Berdasarkan pada teori Marketing politik juga menyediakan perangkat teknik dan metode marketing dalam dunia politik. Menurut Niffenegger, dalam proses Political marketing, digunakan penerapan 4P bauran marketing, yaitu: Pertama, Niffenegger membagi produk politik ke dalam tiga kategori, (1) *party platform* (platform partai), (2) *past record* (catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau), dan (3) *personal characteristic* (ciri pribadi). Dalam tayangan Akacholik tv ini yaitu ciri pribadi yang kental akan keagamaan Didalamnya tayangan ini Aka Cholik membahas mengenai keasliannya sebagai bagian dari Payuputat dan terdapat kampanye kampanye politik dengan menyampaikan pidato mengenai Calon Presiden nomor urut 1, serta seruan semangat kekompakan pada masyarakat Payuputat untuk memperdalam ilmu agama dan segala bidang.

### **4. Kenapa Ada Pemilu dan DPR di Negara Kita???**

Tayangan dalam Aka Cholik TV pada tanggal 03 Januari 2024, yang telah di tonton sebanyak 658 tayangan, dengan judul "Kenapa Ada Pemilu dan DPR di Negara Kita????". Didalamnya tayangan ini Aka Cholik menggunakan tagar #nkridamai. Dalam tayangan kampanye politik milik Aka Cholik TV pendefinisian masalah terdapat dalam kutipan berita di atas, yaitu terdapat dalam kalimat pembuka yang diucapkan oleh Aka Cholik "apakah siap menghadapi pemilu 2024 ini?. Dalam tayangan politik dari akun youtube Aka Cholik TV ini digunakan untuk siapa yang menjadi aktor dalam tayangan tersebut, dapat berupa apa yang

menjadi pembahasan atau mengenai siapa yang dibahas. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan teks berita di atas, yaitu dalam tayangan ini terlihat Aka Cholik sedang melakukan perkumpulan dengan generasi muda, perkumpulan ini terlibat diskusi antara Aka Cholik dengan generasi muda.

Hal ini dapat terlihat dalam tayangan pada Aka Cholik TV di atas, jika dilihat dari strategi politik yang dilakukan oleh Aka Cholik pada tayangan ini, memiliki tujuan untuk dapat menarik simpati masyarakat dengan pemahamannya terhadap politik, hal ini di tunjukkan ketika Aka Cholik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh generasi muda mengenai politik di Indonesia.

Berdasarkan pada teori Marketing politik juga menyediakan perangkat teknik dan metode marketing dalam dunia politik. Menurut Niffenegger, dalam proses Political marketing, digunakan penerapan 4P bauran marketing, yaitu: Pertama, Niffenegger membagi produk politik ke dalam tiga kategori, (1) *party platform* (platform partai), (2) *past record* (catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau), dan (3) *personal characteristic* (ciri pribadi). Dalam tayangan Akacholik tv ini yaitu ciri pribadi yang mengarah pada karakteristik Aka Cholik Darlin sebagai pemimpin yang akan memberikan kedamaian pada masyarakat. Kedua, promosi dalam marketing politik pada tayangan tersebut promosi Aka Cholik TV Aka Cholik akan mengundang melibatkan peran generasi muda yang memberikan beberapa pertanyaan mengenai politik di Indonesia, hal ini bertujuan untuk memberitahu publik pengetahuan Aka Cholik mengenai Politik.

#### **A. Efektivitas Akun Youtube AkacholikTv Sebagai Sarana Marketing Politik**

Akun @akacholikTv memiliki subscriber aktif sebanyak 11 ribu subscriber, dengan postingan lebih dari 594 postingan vidio ini menunjukkan bahwasanya akun ini aktif untuk mengedukasi para subsriber untuk menyajikan dan menampilkan vidio-vidio kampanye politik yang dilakukan calon legislatif daerah. Dari penelitian yang peneliti lakukan pada akun youtube @akacholikTv akun ini banyak membahas mengenai kampanye politik, sosialisasi terhadap masyarakat dan generasi muda serta kemajuan yang terjadi di Kabupaten Pali tempat dimana Aka Cholik Darlin mencalonkan dirinya sebagai anggota DPR partai Bulan Bintang. Pada tanggal 01 Februari 2021 @akacholikTV mengunggah postingan di Youtube yang menjelaskan tentang biografi dirinya bertema " Biografi Aka Cholik Darlin SPdI MM Sang Politisi Islam Bumi Serepat Serasan". Postingan yang diunggah kurang lebih 2 tahun tersebut memperoleh 22 like, 2 komentar dan 256 kali ditonton.

Sebagai salah satu strategi atau marketing politik yang dilakukan oleh Aka Cholik Darlin pada masa sekarang banyak masyarakat yang memanfaatkan media untuk mencari tahu termasuk

tentang calon anggota legislatif yang layak untuk dipilih pada pemilu 2024. Aka Cholik Darlin membuat unggahan vidio pada akun Youtubenanya tentang biodata dirinya, pendidikan, dan juga pengalaman beliau di bidang studi maupun politik.

Pada tanggal 08 Desember 2023 @akacholikTV mengunggah postingan di Youtube mengenai kampanye yang Beliau lakukan bertema “Generasi Z Pasukan Perubahan (kaum muda inginkan perubahan)”, postingan tersebut memperoleh 3 like dan 83 kali penayangan. Kampanye yang dilakukan bersama Calon Presiden yaitu Anies Baswedan, Calon anggota DPR Provinsi Aka Cholik Darlin dan juga Calon Anggota DPR Kabupaten. Pada postingan tersebut Aka Cholik Darlin mengucapkan terima kasih kepada kaum muda yang sanggup bersedia menjadi bagian dari perubahan, dimana banyak orang hanya diam dan hanya berfikir bahwa politik merupakan kepentingan pribadi seseorang.

Dalam kampanye yang dilakukan tersebut Aka Cholik Darlin mempunyai tujuan untuk merubah paradigma dan cara berfikir masyarakat bahwa politik itu tidak ramah dengan anak-anak muda. Dimana mencari perubahan bagaimana Indonesia Sumatera Selatan dan Khususnya anak muda di kabupaten Pali untuk mudah mencari lapangan pekerjaan, tetapi diawali dengan tepat sasaran. Sistem manajemen dalam berpolitik merupakan marketing politik yang dilakukan calon anggota legislatif yang dijelaskan oleh Aka Cholik Darlin kebanyakan caleg menggunakan benner, pembagian kalender, ataupun pembagian kartu nama tetapi mereka tidak mempunyai manajemen. Maka Aka Cholik Darlin mengajak anak-anak muda yang akan menjadi bagian dari program baru yang akan menimbulkan lapangan pekerjaan.

Aka Cholik Darlin mengajak anak muda untuk melakukan sistem manajemen untuk bisa berkomunikasi dan membangun relasi. Dalam pidato yang disampaikan Aka Cholik Darlin menyampaikan bahwa “Sayyidina Ali mengatakan jangan engkau katakan tentang dirimu itu kepada siapapun, bagi orang yang menyukaimu dia tidak butuh itu”. Hal tersebut mempunyai arti bahwasanya sebagai calon DPR provinsi Aka Cholik Darlin dan sebagai anak muda tugas kita tidak dapat memaksa orang untuk suka kepada kita dan untuk memilih kita.

Pada tanggal 09 Desember 2023, akun ini memposting shorts mengenai kampanye melalui media, sebagai bentuk startegi politik yang dilakukan Aka Cholik Darlin. Dalam vidio singkat tersebut Aka Cholik Darlin mempromosikan dirinya sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Pali. Berdasarkan obsevasi yang telah peneliti lakukan terhadap postingan ini bahwasanya menunjukkan Aka Cholik Darlin membentuk strategi atau marketing politiknya sangat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada publik. Pada tanggal 02 Januari 2024 @akacholikTV mengunggah postingan di Youtube mengenai wawancara beberapa anak muda yang

bertema “kenapa ada pemilu dan DPR di Negara kita????”, postingan tersebut memperoleh 2 like dan 122 kali penayangan. Pada vidio yang diunggah menjelang pemilu 2024 Aka cholik Darlin bersama beberapa anak muda yang sedang mewawancarai menjelaskan tentang pemilihan umum dan DPR di Negara Indonesia. Dimana menimbulkan pertanyaan yaitu pemilu itu untuk apa da DPR itu seperti apa lalu yang mengikuti DPR itu siapa saja.

Kemudian Aka Cholik Darlin menjawab beberapa pertanyaan tersebut, pertama pemilihan umum sebagaimana yang sedang ramai-ramainya dibicarakan dan disambut oleh masyarakat pada tahun 2024. Menurutnya, pemilihan umum merupakan yang diatur dalam Undang-undang Negara RI yang dilakukan pada 5 tahun sekali untuk memilih wakil mereka yaitu Pilpres dan DPR memilih wakil yang akan menjadi corong aspirasi masyarakat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan lembaga yang menyampaikan aspirasi masyarakat.

Sebagai strategi politik yang dilakukan Aka Cholik Darlin ini memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dan sebagian masyarakat untuk menanyakan seputaran tentang pemilu, kemudian menimbulkan pertanyaan baru yaitu didalam kesuksesan seorang DPR itu apakah karena mereka berulang kali dipilih?. Yang diapresiasi sebagai pertanyaan bagus dan dijawab oleh Aka Cholik Darlin yang notabennya sebagai Calon anggota DPR di Kabupateb Pali. Aka Cholik Darlin menjawab bahwa DPR yang berhasil menjadi anggota DPR adalah DPR yang memahami situasi kondisi daerahnya sendiri, yang telah memahami masyarakat sendiri untuk disampaikan kepada rapat-rapat pemerintahan. Kesuksesan seorang DPR yaitu yang memkirkan rakyatnya dan apa yang diinginkan rakyat dalam waktu 5 tahun.

Pada pemilihan umum 2024 Aka Cholik Darlin menjelaskan tentang sistematika ataupun cara-cara pencoblosan kepada anak-anak muda yang baru pertama kali untuk mencoblos. Ia menjelaskan bahwa nanti terdapat 5 kertas suara yaitu warna abu-abu untuk pemilihan Presiden, warna kuning untuk DPR RI, warna biru untuk DPRD Provinsi, warna hijau untuk DPRD kabupaten Kota, dan warna merah untuk DPD. Sebagai Marketing politik yang dilakukan Aka Cholik Darlin ia mempromosikan dirinya untuk mencoblos dirinya dengan nomor urut 03 Partai kebangkitan Bangsa sebagai calon anggota DPR Sumatera Selatan.

Kesimpulan pada vidio yang diunggah pada akun Youtube @akacholikTV salah satu marketing politik yang dilakukan Aka Cholik Darlin sebagai calon anggota legislatif kabupaten Pali, Beliau mengajak dan menghimbau anak-anak muda dan masyarakat setempat untuk menjelaskan mengenai pemilu 2024 yang akan datang sebagai bentuk kampanye. Berbeda dengan calon anggota legislatif lainnya Aka Cholik Darlin juga memanfaatkan media Youtube untuk menarik minat

masyarakat.strategi yang dilakukan oleh Aka Cholik Darlin dapat dikatakan telah efektif apabila dilihat berdasarkan pada citra yang ia bentuk melalui marketing politik tersebut, dengan adanya strategi yang ia lakukan telah berhasil dikenali masyarakat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai analisa konteks yang dibangun oleh Aka Cholik Darlin di media sosial Youtube. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Aka Cholik Darlin melakukan strategi politiknya dengan menggunakan Youtube sebagai media politik, banyak membahas mengenai kampanye politik, sosialisasi terhadap masyarakat dan generasi muda serta kemajuan yang terjadi di Kabupaten Pali tempat dimana Aka Cholik Darlin mencalonkan dirinya sebagai anggota DPR partai Bulan Bintang. Berdasarkan pada hasil analisis Marketing politik pada akun Youtube Aka Cholik TV, dalam menjalankan marketing politiknya melalui Youtube Aka Cholik memanfaatkan keadaan atau situasi sekelilingnya.

Dari hasil analisis tersebut didapatkan bahwa jika dilihat berdasarkan teori marketing politik menurut Firmanzah, dalam proses Political marketing, digunakan penerapan 4P bauran marketing, dan Aka Cholik hanya menggunakan 2P pada marketing politiknya, yaitu: Pertama, Niffenegger membagi produk politik ke dalam tiga kategori, salah satunya ciri pribadi dalam tayangan Akacholik tv ini yaitu ciri pribadi yang mengarah pada karakteristik Aka Cholik Darlin sebagai pemimpin yang akan memberikan kedamaian pada masyarakat, edukasi, dan keagamaan. Kedua, promosi dalam marketing politik pada tayangan tersebut promosi Aka Cholik TV Aka Cholik akan mengundang melibatkan peran generasi muda.

### **REKOMENDASI**

Dari hasil penelitian di atas, peneliti akan menyampaikan beberapa saran, antara lain: Aka Cholik TV diharapkan agar selalu memberikan atau menyampaikan hal positif mengenai politik Indonesia terutama yang menyangkut marketing politik. Bagi calon anggota legislatif diharapkan bahwa dapat memperhatikan marketing berpolitik dengan cara membangun komunikasi kebanyakan pihak dalam memobilisasi tim kampanye. Serta, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat melakukan analisis lebih mendalam mengenai analisis marketing kampanye.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bloon, N. 2020. "Fungsi Partai Politi." *Jurnal Workin Paper* 1(1).

Cangara, Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darlin, Biografi Aka Cholik. 2018. "No Title." *18.01*.

Tiara Yunita, Ainur Ropik, Siti Anisyah, *Marketing Politik Aka Cholik Darlin Pada Akun Youtube Aka Cholik Tv Menuju Pemilu 2024, JSIPOL, Vol.3 Issue.2 No.4, April 30, 2024*

Handika. 2020. "Marketing Politik Calon Legislatif Generasi Milenial." *Journal of Civic Education* 2(1).

Hayat, Nahrul. 2019. *Buku Ajar Komunikasi Politik*. Jakarta: CV. Pilar Nusantara.

Lestari, L. 2020. "Marketing Politik Pemenangan Jokowi-Jk Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Politik* 3(1).

Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

MPOC, lia dwi jayanti, dan Jennifer Brier. 2020. *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21(1):1–9.

Nurdiansyah, F. 2020. "Marketing Politik DPP Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014." *Jurnal Ilmu Politik* 3(1).

Rauf, Maswadi. 2003. *Indonesia dan Politik*. Jakarta: Gramedia.

Rianda, G. 2020. "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 7(2).

Sobari, Wawan. 2022. "Media Sosial Sebagai Sarana Marketing Politik Digital." *Jurnal Ilmu Politik* 3(1).

Sugiyono. 2018. *Metde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Valencia, Viera. 2019. "V." *Angewandte Chenie International Edition* 6(11).

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2024 DI DESA KERTAJAYA KABUPATEN PANGANDARAN**

**Nur Aziz<sup>1</sup>**

STITNU Al Farabi Pangandaran

E-mail : nuraziz@stitnualfarabi.ac.id

### **ABSTRACT**

*The 2024 general election is one of Indonesia's democratic events, allowing people to choose their future leaders. Creating a successful democratic atmosphere relies heavily on community participation in organizing the 2024 election. This study aims to analyze the participation of young people as KPPS in the 2024 general election in Kertajaya Village, Cigugur District, Pangandaran Regency, where youth participation remains low. The study was conducted in Kertajaya Village, Cigugur District, Pangandaran Regency, West Java Province. The research uses a qualitative method with a descriptive approach to provide a systematic, factual, and accurate description of the factors, characteristics, and relationships among the phenomena being investigated. Data was collected through in-depth interviews and literature reviews. Data analysis was conducted using the new institutional approach, political participation theory, the concept of general elections, and the role of youth in general elections to analyze the focus of the study. The study found that in the KPPS recruitment process, the initiative from the community to register independently was very low. The factors that hinder youth participation include a lack of self-confidence, the apathetic attitude of youths who are reluctant to engage in the election process, insufficient information they receive, the attitude of election organizers at the village or sub-district level that does not trust young people, and the requirements that incur additional costs. Thus, the General Election Commission must make maximum efforts to increase youth participation as KPPS in the 2024 general election.*

**Keywords :** *Community Participation, General Election 2024, KPPS, Election Organiser*

### **ABSTRAK**

Pemilihan umum 2024 merupakan salah satu agenda pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam proses menentukan pilihan terhadap pemimpin dimasa yang akan datang. Menciptakan suasana demokrasi yang sukses tidak lepas dari partisipasi masyarakat menjad penyelenggara pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat muda sebagai KPPS pada Pemilu 2024 di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dimana partisipasi pemuda masih rendah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan deskripsi, gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang faktor-faktor, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan institusional baru, teori partisipasi politik, konsep pemilihan umum, dan peran pemuda dalam pemilihan umum guna menganalisis masalah yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa proses rekrutmen KPPS, inisiatif dari masyarakat untuk mendaftar secara mandiri sangat rendah. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi pemuda meliputi kurangnya rasa percaya diri, sikap apatis pemuda yang enggan terjun dalam proses pemilu, kurangnya informasi yang mereka terima, sikap penyelenggara pemilu di tingkat desa atau kelurahan yang tidak memberikan kepercayaan kepada pemuda, serta persyaratan yang memerlukan biaya. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum perlu berupaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemuda sebagai KPPS pada Pemilu 2024.

**Kata Kunci :** Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum 2024, KPPS, Penyelenggara Pemilu

## **PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus sesuai dengan konstitusi. Kedaulatan rakyat berarti rakyat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Maka dari itu sebagai rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024 baik tingkat atas maupun tingkat bawah (Pemerintahan Indonesia, 1945).

Salah satu agenda negara Indonesia yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali adalah pemilihan umum. Tepat pada tahun 2024 Indonesia melaksanakan pemilihan umum 2024, didalamnya terdapat 5 (lima) jenis pemilihan diantaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sejalan dengan pengertian pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pemerintahan Indonesia, 2017).

Proses demokrasi yang melibatkan rakyat sebagai inti dari segala sesuatu, berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi yang berkualitas tercipta ketika rakyat berperan aktif dalam partisipasi dan pengawasan. Keterlibatan masyarakat menjadi titik sentral untuk memastikan demokrasi dan pemilu berjalan dengan baik dan memiliki makna yang mendalam (Azhar, 2018). Dalam hal ini diharapkan masyarakat mampu berperan aktif dalam menjadi penyelenggara pemilu tahun 2024 (Kusuma et al., 2022). Oleh karena itu masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilihan umum sebagai bagian dari pesta demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemilu karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Masyarakat adalah faktor utama yang menentukan kesuksesan sebuah pemilu. Keberhasilan pemilu memiliki dampak besar pada proses perkembangan kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat luas (Sahbana, 2017).

Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang didalamnya terdapat banyak persoalan terutama dalam proses pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Kertajaya Kabupaten Pangandaran. Warga Desa setempat pun memiliki SDM muda yang cukup tetapi dalam kenyataannya partisipasi masyarakat dalam mendaftar sebagai anggota KPPS kurang partisipasinya. Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur termasuk wilayah yang kesulitan dalam merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kurangnya minat masyarakat, beban kerja yang berat, dan honor yang kurang menjadi alasan mengapa banyak orang tidak mau mendaftar menjadi anggota KPPS.

Penelitian ini mendapatkan dukungan dari penelitian terdahulu yang fokus terhadap partisipasi masyarakat dalam berkontribusi sebagai penyelenggara pemilu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati et al., 2021) dengan judul penelitian “Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024” menunjukkan hasil penelitiannya bahwa sikap penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan yang lebih mengutamakan pemuda, dan keinginan pemuda sendiri untuk terlibat dalam pemilu. Sebaliknya, faktor yang menghambat adalah sikap apatis pemuda yang enggan terjun dalam pemilu, kurangnya informasi yang mereka terima, dan sikap penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan yang tidak memberikan kepercayaan kepada pemuda.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ilham et al., 2024) dengan judul penelitian “Strategi Pemerintahan yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)” menunjukkan hasil penelitiannya bahwa strategi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dinilai mampu meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu 2019. Namun terdapat permasalahan, dimana dalam proses rekrutmen penyelenggara KPPS masih diisi oleh tokoh masyarakat yang sudah berusia lanjut, memiliki keterbatasan fisik dan mudah kelelahan, waktu penyampaian bimtek yang kurang tepat, lemahnya minat baca terhadap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggara pemilu.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu ternyata saling keterkaitan antara korelasi masalah yang terjadi sama-sama kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu yang bisa menentukan kualitas pemilu. Selain itu kesamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yaitu pemilu tetapi dalam kurun waktu yang berbeda yaitu 2024. Adapun perbedaan dalam penelitian ini diantaranya lokasi penelitian, waktu penelitian, serta faktor-faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda sebagai penyelenggara pemilu 2024 di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran cukup rendah, dengan tingkat partisipasi kurang dari 70%. Penyelenggara pemilu yang dimaksud di sini adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu. Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah penulis tertarik untuk analisis partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilu 2024 di Desa Kertajaya Kabupaten Pangandaran sedangkan regulasi telah mendukung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Desa, yang beralamatkan di Jalan Raya Pagerbumi No. 57 Dusun Cikuya RT. 005 RW. 005 Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 46392. Adapun waktu penelitian dalam kurun waktu 1 bulan mulai dari 11 Desember 2023 – 25 Januari 2024 dimana waktu itu merupakan proses perekrutan KPPS untuk pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini mencakup Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Desa Kertajaya, serta masyarakat setempat yang tidak menjadi KPPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari angka, tulisan, dan kata-kata. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen, buku, data statistik, laporan, dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui proses reduksi data dan penyajian, yang akhirnya menghasilkan kesimpulan berdasarkan jawaban dari para informan (Sugiyono, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Herbert McClosky partisipasi politik adalah tindakan sukarela oleh warga masyarakat di mana mereka terlibat dalam proses pemilihan pemimpin dan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan publik. Berdasarkan definisi ini, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan penguasa, termasuk di dalamnya partisipasi politik pemuda dalam pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat khususnya pemuda dalam pemilihan umum adalah menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Atmaja et al., 2020). Namun, pada kenyataannya pemilu 2024 di Desa Kertajaya Kabupaten Pangandaran, partisipasi masyarakat muda dalam menjadi

penyelenggara tingkat KPPS sangat rendah, terlihat dari persentase jumlah pendaftar yang inisiatif untuk melibatkan diri dalam data pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Antara Pendaftar KPPS yang Inisiatif Dirinya dan Pendaftar yang Harus Melalui Dorongan Terlebih Dahulu**

No	Nomor TPS	Keterlibatan Secara Mandiri	Persentase (%)	Melalui Proses Pendorongan	Persentase (%)	Jumlah Pendaftar
1	001	5	71.4	2	28.6	7
2	002	5	71.4	2	28.6	7
3	003	4	57.1	3	42.9	7
4	004	4	57.1	4	57.1	8
5	005	6	85.7	1	14.3	7
6	006	6	85.7	1	14.3	7
7	007	7	100	0	0	7
8	008	5	71.4	2	28.6	7
9	009	4	57.1	3	42.9	7
10	010	4	57.1	3	42.9	7
11	011	5	71.4	2	28.6	7
12	012	4	57.1	3	42.9	7
13	013	7	100	0	0	7
<b>Total</b>		<b>66</b>	<b>942.9</b>	<b>26</b>	<b>371.4</b>	<b>92</b>

Sumber: Data Pendaftar KPPS Desa Kertajaya Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hanya terdapat 2 TPS yang terpenuhi oleh pendaftar yang inisiatif sendiri, sisanya masih terdapat kekurangan pendaftar. Setelah ditelusuri bahwa terdapat fenomena yang menyatakan bahwa yang mendaftarkan secara inisiatif yaitu pendaftar yang memang sudah berpengalaman atau sudah berumur, tetapi pemudanya kurang berpartisipasi dalam hal ini. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua PPS Desa Kertajaya Empay Nurdiansyah:

*“... Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dimana saya kerja memang cukup susah dari dulu juga untuk mencari anggota KPPS, jika dilihat dari data pendaftar memang yang mendaftarkan diri secara mandiri itu orang-orang yang sudah berpengalaman, tetapi generasi yang selanjutnya tidak ada. Maka dari itu kami melakukan sosialisasi dan terus untuk mendorong agar mendaftar menjadi anggota KPPS, bahkan ada yang dijemput ke rumahnya...” Wawancara Pribadi, 2024.*

Adapun sosialisasi informasi mengenai tahapan rekrutmen oleh KPU, PPK, maupun PPS perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan memahami proses pendaftaran KPPS. Meskipun anggaran terbatas, diperlukan kreativitas dari pihak penyelenggara untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tahapan pendaftaran KPPS. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, baik secara *online* melalui situs web, akun instagram (@*ppsdskertajaya*), akun facebook, dan media lainnya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan memasang spanduk di lokasi strategis dan memanfaatkan media yang ada, seperti memasang pengumuman di kantor desa atau kelurahan serta mengumumkannya di masjid-masjid disaat ada pengajian bulanan maupun mingguan. Untuk meningkatkan partisipasi pemuda sebagai KPPS, PPS juga mengadakan sosialisasi di lembaga kepemudaan di tingkat desa atau kelurahan.

Dalam pelaksanaan rekrutmen KPPS yang ternyata kurang dari minimal pendaftar yaitu 7 (tujuh) orang, PPS harus memaksimalkan agar kuota pendaftar KPPS terpenuhi. Sehingga PPS Desa Kertajaya melakukan pendorongan khususnya bagi pemuda yang memang cakap serta memenuhi syarat untuk mendaftar KPPS. Mekanisme ini dilakukan saat ada kekurangan pendaftar, tetapi di wilayah Desa Kertajaya ini tidak sampai ke mekanisme penunjukkan atau kerja sama dengan lembaga pendidikan. Dalam proses pendorongan ini dimaksimal untuk pemuda, karena memang pemuda sangat diperlukan dalam menghadapi pemilu yang kompleks, karena beban kerja yang lebih berat dibandingkan pemilu sebelumnya. Meskipun kurang berpengalaman, hal ini bukan hambatan karena yang paling penting dalam peran sebagai penyelenggara pemilu adalah integritas (Siregar, 2022).

Hal ini sejalan dengan pendapat (La Palombara & Weiner, 2015), salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah keterlibatan pemerintah yang luas, yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif. Faktor-faktor dalam sistem politik ini juga berperan dalam mendorong keterlibatan pemuda untuk turut serta sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, peran pemuda juga didukung langsung oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35 ayat 1, dimana anggota KPPS paling rendah usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, ini menjadi lebih baik dibandingkan pada pemilu tahun 2014, batas usia minimal untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah 25 tahun. Hal ini memberi peluang yang lebih besar bagi pemuda untuk berpartisipasi sebagai petugas KPPS, karena lebih banyak dari mereka yang memenuhi persyaratan usia tersebut (Harahap, 2019).

Walaupun regulasi telah mendukung untuk menjadi seorang anggota KPPS nyatanya masih banyak pemuda yang tidak tertarik akibat berbagai faktor untuk tidak menjadi seorang anggota KPPS dan tidak ikut dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemuda yang ada di wilayah kerja TPS 001, TPS 012, dan TPS 009 berikut ini faktor yang menghambat untuk tidak terlibat dalam penyelenggara pemilu 2024:

### 1. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi menyebabkan informasi tentang rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak tersebar secara optimal, sehingga masyarakat memiliki persepsi bahwa rekrutmen KPPS dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Akibatnya, banyak yang mengira bahwa hanya anggota keluarga PPS atau perangkat desa yang didorong untuk mendaftar menjadi anggota KPPS. Padahal, sebenarnya proses rekrutmen KPPS seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Kesalahpahaman ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi yang efektif untuk memastikan masyarakat memahami bahwa proses rekrutmen KPPS terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat dan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Dengan sosialisasi yang tepat, harapannya, partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen KPPS dapat meningkat dan persepsi yang keliru dapat diatasi.

### 2. Kurangnya Percaya Diri

Banyak pemuda yang enggan mendaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena kurangnya rasa percaya diri, terutama karena mereka belum pernah terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Ketidakpastian mengenai tugas dan risiko kesalahan membuat mereka takut berpartisipasi. Kekhawatiran ini diperparah oleh rumor tentang banyaknya anggota KPPS yang meninggal saat bekerja pada pemilu 2019, yang menciptakan gambaran berisiko tinggi dalam benak mereka. Rumor ini, yang seringkali dibesar-besarkan, menimbulkan rasa cemas akan kondisi kesehatan dan beban kerja. Pemuda juga merasa kurang mendapat dukungan dan pelatihan yang cukup, sehingga menambah ketidakpastian mereka untuk terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih baik untuk menghilangkan ketakutan dan membangun kepercayaan diri, seperti melalui sosialisasi, pelatihan, dan transparansi yang memadai.

### 3. Adanya Persyaratan yang Memerlukan Biaya

Ketika seseorang ingin mendaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mereka harus memenuhi berbagai persyaratan, dan salah satunya adalah Surat Keterangan Sehat yang mencakup pemeriksaan kadar kolesterol. Untuk mendapatkan surat ini, pemohon harus membayar biaya antara Rp45.000 hingga Rp60.000. Biaya ini menjadi kendala bagi banyak pemuda yang ingin mendaftar, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam pemilu. Bagi beberapa orang, biaya tersebut dianggap tinggi, terutama jika mereka tidak memiliki pekerjaan tetap atau masih bergantung pada orang tua. Akibatnya, persyaratan ini

bisa mengurangi minat dan niat pemuda untuk berpartisipasi sebagai anggota KPPS. Sebagai solusi, upaya untuk mengurangi atau menghilangkan biaya ini, atau menawarkan alternatif pemeriksaan kesehatan yang lebih terjangkau, dapat membantu meningkatkan partisipasi pemuda dalam proses pemilu.

#### 4. Sikap Apatis

Sikap apatis pemuda terhadap keterlibatan dalam proses pemilu menjadi salah satu hambatan utama bagi partisipasi politik. Seperti yang dijelaskan oleh Nur Aziz dan Ruhinah, seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Kertajaya Kabupaten Pangandaran, ada kesulitan dalam merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena faktor beban kerja dan honor yang rendah dimata mereka. Akibatnya, banyak orang lebih memilih pekerjaan lain yang lebih ringan dan menghasilkan lebih banyak uang. Salah satu pemuda juga mengungkapkan sikap apatisnya, mengatakan bahwa ia bosan dengan kewajiban mengikuti rapat dan pelatihan terus-menerus, meski telah ditawari posisi sebagai KPPS. Sikap seperti ini menambah tantangan dalam mengajak pemuda untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengungkapkan empat faktor utama yang menyebabkan seseorang enggan berpartisipasi dalam politik khususnya dalam penyelenggara pemilu (KPPS). Faktor-faktor tersebut adalah: (1) kurangnya sosialisasi; (2) keyakinan bahwa berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah sesuatu yang sia-sia; (3) kurangnya percaya diri karena dianggap pemula; dan (4) merasa terbebani ketika ada persyaratan yang harus memerlukan biaya. Faktor-faktor ini dapat menghambat partisipasi politik dan memerlukan pendekatan yang tepat untuk mendorong keterlibatan masyarakat (Julita et al., 2023).

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi pemuda di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran harus menjadi perhatian utama bagi KPU Kabupaten Pangandaran untuk persiapan menuju Pemilu 2029. Kegagalan dalam merevisi Undang-Undang Pemilu untuk tahun 2029 menyoroti pentingnya memberikan perhatian serius pada proses rekrutmen, terutama pada tingkat *Ad Hoc* seperti KPPS. Refleksi atas partisipasi pemuda sebagai penyelenggara Pemilu 2019 di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur memberikan gambaran untuk perencanaan Pemilu 2029. Kurangnya antusiasme masyarakat menimbulkan kekhawatiran terkait regenerasi untuk Pemilu 2024 (Suryahudaya, 2022). Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pangandaran perlu memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mengadakan semiar kepemiluan di luar jadwal resmi. Dengan memberikan pemahaman kepada pemuda tentang pentingnya pemilu, diharapkan mereka bisa menjadi

agen sosialisasi di masyarakat, setidaknya di antara keluarga mereka, untuk mengurangi potensi pelanggaran pemilu dan mendorong pemuda untuk menjadi anggota KPPS pada pemilu berikutnya. Selain itu, faktor-faktor yang mendorong partisipasi pemuda harus terus dipelihara agar wilayah-wilayah dengan tingkat partisipasi yang baik dapat mempertahankan pencapaian mereka pada pemilu sebelumnya (Lengkoan et al., 2022).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan pembahasan ini menyoroti rendahnya partisipasi pemuda sebagai penyelenggara pemilu 2024 di Desa Kertajaya, Kabupaten Pangandaran. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan lainnya mendukung keterlibatan masyarakat dalam pemilu, realitanya, keterlibatan pemuda dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih rendah. Beberapa faktor yang menghambat partisipasi pemuda antara lain adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya rasa percaya diri, persyaratan yang memerlukan biaya, dan sikap apatis.

Kurangnya sosialisasi menyebabkan informasi tentang rekrutmen KPPS tidak sepenuhnya tersampaikan. Rasa percaya diri yang rendah disebabkan oleh kurangnya pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu. Persyaratan surat keterangan sehat yang memerlukan biaya tambahan juga menjadi penghalang. Sikap apatis muncul karena beban kerja yang berat dan honor yang relatif rendah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada peningkatan sosialisasi melalui berbagai media dan kegiatan kepemudaan. Selain itu, mendorong keterlibatan pemuda dalam kegiatan di tingkat desa atau kelurahan dapat menjadi langkah penting. KPU Kabupaten Pangandaran juga harus memaksimalkan upaya rekrutmen KPPS dan mempertimbangkan revisi Undang-Undang Pemilu untuk tahun 2029 guna meningkatkan partisipasi pemuda. Dengan solusi-solusi ini, diharapkan partisipasi pemuda sebagai penyelenggara pemilu dapat meningkat, sehingga kualitas pemilu dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional dapat menjadi lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmaja, T. S., Sulistyarini, S., & Dewantara, J. A. (2020). Partisipasi Politik Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 47–58.
- Azhar, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 206–214.
- Harahap, A. F. (2019). Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia. *Skripsi Fakultas Hukum Indralaya, Universitas Sriwijaya*.

- Ilham, M., Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2024). Strategi Pemerintahan yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 7(1), 125–138.
- Julita, E., Firman, A., Surbakti, F. A., & Hutapea, D. J. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 5(4).
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93–104.
- La Palombara, J., & Weiner, M. (2015). *Political Parties and Political Development*. Princeton university press.
- Lengkoan, I. C. J., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Governance*, 2(1).
- Pemerintahan Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Indonesia. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf>
- Pemerintahan Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1)* (hal. 2). <https://peraturan.go.id/files/uu7-2017bt.pdf>
- Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, 51.
- Siregar, M. H. S. M. H. (2022). Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 4(1), 21–35.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sulistyowati, D., Yakub, A., & Ariana, A. (2021). Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(8), 3772–3781.
- Suryahudaya, E. G. (2022). *Tak Perlu Ratu Adil: Kumpulan Esai tentang Politik, Demokrasi, dan Anak Muda*. Kepustakaan Populer Gramedia.